

EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARANCY INITIATIVE TIMOR-LESTE (EITI-TL)

LAPORAN REKONSILIASI TL – EITI TAHUN 2012

Februari 2015



Laporan ini dibuat berdasarkan usulan dari Multi Stakeholder Working Group (MSWG) untuk keperluan implementasi Sekretariat EITI di Timor Leste. Pandangan yang diungkapkan dalam laporan adalah milik Rekonsiliator Independen dan sama sekali tidak mencerminkan opini resmi TL-EITI dan MSWG. Laporan ini telah disiapkan secara eksklusif untuk digunakan oleh TL-EITI dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain, atau untuk tujuan apa pun selain mereka yang dimaksudkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	6
1. Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan Tugas (assignment)	7
1.3. Sifat dan Jangkaun Pekerjaan	8
2. Rangkuman Eksekutif	9
2.1. Batasan Rekonsiliasi	9
2.2. Pendapatan dari Sektor Ekstraktif	9
2.3. Data Produksi Minyak dan Gas	10
2.4. Data Lengkap dan Akurat	10
2.5. Pembayaran Rekonsiliasi	11
3. Pendekatan dan Metodologi	13
3.1. Rapat Awal	13
3.2. Tahap Awal	13
3.3. Proses Rekonsiliasi	14
3.4. Keakuratan dan Kredibilitas Data EITI	15
3.5. Dasar Laporan	15
4. Visi Umum Sektor Ekstraktif Timor Leste	16
4.1. Sektor Minyak dan Gas	16
4.2. Sektor Mineral	26
5. Cakupan Rekonsiliasi	28
5.1. Seleksi untuk cakupan Rekonsiliasi	28
5.2. Perusahaan Ekstraktif yang masuk dalam Rekonsiliasi EITI	28
5.3. Mencakup Pajak dan Pendapatan	29
5.4. Entitas Pemerintah	29
5.5. Diagram alir aliran pembayaran untuk sektor ekstraktif	30
6. Hasil Rekonsiliasi	31
6.1. Rekonsiliasi dari Perusahaan Ekstraktif	31
6.2. Rekonsiliasi dari Aliran pendapatan (revenue stream)	32
6.3. Penyesuain	33
6.4. Perbedaan dari yang tidak direkonsiliasi	35
7. Data yang dilaporkan	36
7.1. Analisis dari pendapatan pemerintah	36
7.2. Tanggung Jawab sosial perusahaan	37

8. Rekomendasi	38
8.1. Pelajaran yang didapat dari rekonsiliasi tahun 2012	38
8.2. Menindaklanjuti (Follow up) rekomendasi dari laporan EITI terdahulu	40
Lampiran	41
Lampiran 1: Pendapatan Lengkap dari Perusahaan besar Minyak dan Gas	42
Lampiran 2: Perubahan pendapatan Minyak dan Gas antara 2008-2012	43
Lampiran 3: Lokasi Kontrak TLEA dan JPDA	44
Lampiran 4: Sumur Minyak Dan Gas pada daratan RDTL	45
Lampiran 5: Profil Perusahaan Ekstraktif	46
Lampiran 6: Kekayaan Sumber Daya Mineral di RDTL	48
Lampiran 7: Pendapatan Sektor Pertambangan 2012	49
Lampiran 8: Kontrak Personal yang terlibat pada Rekonsiliasi EITI 2012	50

Singkatan dan Definisi	
APT	Additional Profit Tax
BOE	Barrel of Oil Equivalent
BPA	Banking and Payments Authority
BCTL	Bank Central Timor-Leste
EITI	Extractive Industries Transparency initiative
ESI	Estimated Sustainable Income
ETRS	East Timor Revenue Service
FTP	First Tranche Petroleum
GDP	Gross Domestic Product
DJE	General Directorate of Statistics
Gov	Government
IA	Independent Administrator
IFAC	International Federation of Accountants
IPMC	Interim Petroleum Mining Code
ISRS	International Standards on Related Services
IUA	International Unitisation Agreement
JC	Joint Commission
JPDA	Joint Petroleum Development Area
LNG	Liquefied Natural Gas
MoU	Memorandum of Understanding
MPRM	Ministériu Petróleu e Rekursu Minerais
MSWG	Multi Stakeholder Working Group
DNPPM	Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral
ANP	Autoridade Nacional do Petróleo
O&G	Oil & Gas
PF	Petroleum Fund
PMC	Petroleum Mining Code
PSC	Production Sharing Contract
RDTL	República Democrática de Timor-Leste
SERN	Sekretáriu Estadu Rekursu Naturais
SOE	State-Owned Enterprise
SPT	Supplemental Petroleum Tax
TCF	Trillion Cubic Feet
TDA	Taxes and Duties Act
TLEA	Timor-Leste Exclusive Area
ToR	Terms of Reference
TSDA	Timor Sea Designated Authority
TST	Timor Sea Treaty

Singkatan dan Definisi

UNTAET	United Nation Transition Administration in East Timor
VAI	Value Added Tax
WHT	Withholding Tax
ZOCA	Zone Cooperation Area

Kata Pengantar

Laporan TL-EITI tahun 2012 adalah laporan Timor Leste pertama yang diproduksi berdasarkan standar EITI yang baru.

Hal ini datang dengan pandangan (outlook) tentang ekonomi negara, Ini berawal dari beberapa angka mengenai Industri pertambangan pasir dan kerikil Timor – leste. Badan Usaha Milik Negara Timor Leste yaitu Timor Gap, masuk daftar untuk pertama kalinya dalam laporan ini. Konten lokal dan upaya tanggung jawab sosial Perusahaan juga dirinci dalam laporan ini.

Laporan ini juga diwarnai oleh perbedaan-perbedaan di dalam MSWG yang membutuhkan diskusi intensif yang menyebabkan keterlambatan signifikan dalam proses pembuatan laporan ini.

Sebagai sarana untuk mengatasi beberapa kekhawatiran anggota MSWG, Perjanjian Kerahasiaan (PK) harus ditandatangani antara Reconciler dan perusahaan. Perjanjian Kerahasiaan (PK) ini mungkin membutuhkan perhatian Dewan Internasional EITI untuk memastikan bahwa sifat dari Perjanjian Kerahasiaan (PK) ini tidak mengelak persyaratan standar baru.

Selamat kepada semua entitas yang berpartisipasi dalam menyusun laporan TL-EITI kelima Timor Leste.



Alfredo Pires

Alfredo Pires

Mentri Perminyakan dan Kekayaan Mineral

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Republik Demokratik Timor-Leste (EITI-RDTL) melaksanakan rekonsiliasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, proses rekonsiliasi ini dilakukan oleh Moore Stephens sesuai dengan kontrak kerja tertanggal 18 September 2014 dan sebagaimana disetujui oleh Multi-Stakeholder Working Group (MSWG).

Ini adalah laporan rekonsiliasi ke-empat sejak RDTL menjadi negara anggota EITI pada 1 Juli 2010 hingga saat ini sudah empat (4) laporan tahunan EITI telah diterbitkan yang meliputi periode dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2011. Ringkasan laporan diperlihatkan di bawah:

Tahun	Data Publikasi	Mencakup Sektor	Pendapatan Pemerintah (USD Juta)	Pembayaran Perusahaan (USD Juta)	Total Perusahaan yang melapor	Rekonsiliator
2008	October 2009	Minyak dan Gas	2,510	2,510	16	Deloitte
2009	Februari 2011	Minyak dan Gas	1,764	1,764	17	Deloitte
2010	Desember 2012	Minyak dan Gas	2,150	2,150	20	Moore Stephens LLP
2011	Desember 2012	Minyak dan Gas	3,453	3,453	20	Moore Stephens LLP

Garis waktu (Timeline)

MSWG harus melakukan proses validasi paling lambat 1 Oktober 2015. Tabel berikut menyimpulkan garis waktu (timeline) TL-EITI.

Tahun	Perincian
2003	Pemerintah RDTL mengumumkan komitmen pada EITI
2004	Produksi dimulai dari sumur minyak Bayu Undan
2005	Dana minyak bumi RDTL ditetapkan oleh UU no.9/2005
2006	Pemerintah mengundang membentuk MSWG EITI
2007	Pertemuan pertama MSWG EITI
2008	ANP ditetapkan oleh UU No 2 – 2008
2008	Sekretariat EITI didirikan
2008	RDTL menjadi negara kandidat anggota EITI
2009	Laporan 2008 TL-EITI diterbitkan
2009	Menyelesaikan pedoman EITI dari MSWG
2010	RDTL menjadi negara patuh EITI.
2011	Laporan tahunan 2009 EITI diterbitkan
2012	Laporan tahunan 2010 diterbitkan
2012	Laporan tahunan EITI 2011 diterbitkan
Oct. 2015	Tenggat waktu untuk validasi berikutnya

1.2. Tujuan Penugasan (assignment)

Penugasan terdiri dari rekonsiliasi terperinci tentang pembayaran yang dibuat dan diumumkan oleh sektor ekstraktif (setelah ini disebut sebagai “Perusahaan”) dengan data pendapatan yang disediakan oleh beberapa instansi pemerintahan RDTL (setelah ini disebut sebagai “Entitas Pemerintah”).

Tujuan keseluruhan dari pelaksanaan rekonsiliasi ini adalah untuk membantu pemerintah RDTL, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk menentukan kontribusi sektor ekstraktif dalam pembangunan ekonomi sosial negara, dan ini untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab di sektor sumber daya ekstraktif.

1.3. Sifat dan Jangkaun Kerja

Rekonsiliasi ini dilakukan sesuai dengan standar internasional mengenai pelayanan terkait, yang berlaku pada prosedur yang telah disepakati. Prosedur yang dipakai adalah prosedur yang ditetapkan dalam konteks rujukan (ToR) dilampirkan dalam kontrak kerja yang dirujuk pada RFP/01/MPRM – 2014 dan disetujui oleh MSWG.

Kami memaparkan temuan dalam laporan ini dan lampiran terkait. Prosedur rekonsiliasi yang dilakukan tidak dirancang untuk diaudit atau review sesuai dengan Internasional Standar Audit atau Standar Internasional Perikatan Peninjauan dan akibatnya kami tidak mengungkapkan jaminan apa pun atas transaksi di luar pernyataan eksplisit yang ditetapkan dalam laporan ini. Kami telah melakukan prosedur tambahan terkait hal-hal lain yang mungkin menjadi perhatian kami telah dilaporkan.

Laporan ini memberikan latar belakang singkat, ruang lingkup dan tujuan, metodologi dan pendekatan kami untuk proses rekonsiliasi. Ini yang kemudian memberikan rincian temuan kami, rekomendasi untuk perbaikan dan jalan ke depan untuk proses rekonsiliasi.

Laporan kami menggabungkan informasi yang diterima, dan termasuk 29 Januari 2015 terkait dengan tahun rekonsiliasi tersebut berakhir 31 Desember 2012. Setiap informasi yang diterima setelah tanggal tersebut tidak disertakan dalam laporan ini. Konfirmasi yang tidak mempengaruhi data atau rekonsiliasi yang diterima selanjutnya, telah termasuk.

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

2.1 Batasan Rekonsiliasi

Pekerjaan yang akan dilakukan diatur dalam ToR untuk yang berkaitan (engagement). Termasuk memperoleh informasi kontekstual dari entitas pemerintah. Namun, selama pekerjaan kami tidak dapat memperoleh informasi berikut yang berkaitan dengan sektor ekstraktif di RDTL.

- Kurangnya data mengenai pekerjaan di industri ekstraktif dalam hal mutlak dan sebagai persentase dari total pekerjaan
- Kurangnya data berhubungan dengan produksi Minyak dan Gas berdasarkan komoditas, dan
- Kurangnya data berhubungan dengan produksi Minyak dan Gas.

Akan tetapi, selain pengaruh hal – hal yang digambarkan di atas, kita dapat secara rasional menyimpulkan bahwa laporan kita mencakup semua aspek lain dari standard EITI.

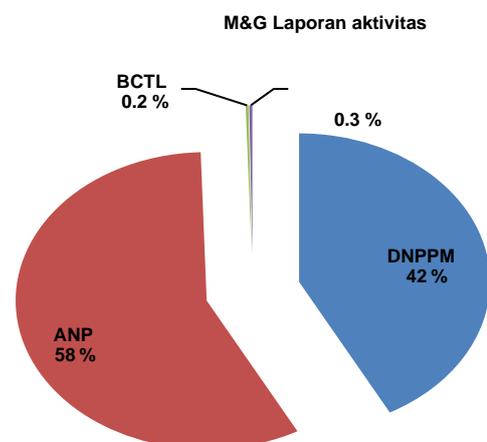
2.2. Pendapatan Dari Sektor Ekstraktif

Pendapatan RDTL yang dihasilkan dari Sektor Ekstraktif meningkat sebesar **USD 330** Juta atau **10%** dari **USD 3,254** Juta pada tahun 2011 menjadi **USD 3,583** Juta pada tahun 2012.

Tabel dibawah menunjukkan pembagian berdasarkan antara 2011 dan 2012

Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstratif	2012	2011	Bervariasi	
	USD Juta	USD Juta	USD Juta	%
Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (DNPPM)	1,600	1,320	280	21%
Autoridade Nasional Petroleo (ANP)	2,181	2,125	56	3%
Banco Central Timor – Leste (BCTL)	9	8	1	13%
Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekstratif Minyak dan Gas	3,790	3,453	337	10%
Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas yang berhubungan dengan Minyak dan Gas (non extractive)	10	13	(3)	-23%
Pendapatan yang dihasilkan dari sektor Minyak dan Gas	3,800	3,466	334	10%
Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertambangan	0.04	0.03	0.01	47%
Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif	3,800	3,466	334	10%
Sebagian pendapatan dialokasikan ke Australia	(217)	(213)	(5)	2%
Sebagian pendapatan dialokasikan ke RDTL	3,583	3,254	330	10%

Perbedaan ini terutama dijelaskan oleh peningkatan pembayaran yang diterima oleh DNPPM selama 2012 (+USD 280 juta) terutama melalui pajak tambahan yang meningkat sebesar USD 214 juta. Kami mencatat bahwa struktur pendapatan sektor ekstratif hampir sama dengan tahun 2011. Diagram di samping ini menunjukkan perpecahan pendapatan sektor ekstraktif yang diterima selama 2012.



¹ Menurut Perjanjian Laut Timor (TST) yang mengatur Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA), Australia berhak atas 10% dari minyak bumi yang diproduksi di JPDA. Lihat bagian 4.1.2.

² Pajak tambahan termasuk ketentuan pajak dan denda lainnya.

2.3. Data Produksi Minyak dan Gas

Produksi Minyak dan Gas meningkat sebesar **5.609.892** barel atau **8,1%** antara tahun 2011 dan 2012. Tabel di bawah ini merangkum produksi Minyak dan Gas selama tahun 2011 dan 2012 berdasarkan lapangan:

Lapangan	2012 Barel (BOE)	2011 Barel (BOE)	Variasi Barel (BOE)	%
Bayu Undan	60,866,794	65,954,265	(5,087,471)	-7.7%
Kitan	13,616,451	2,919,088	10,697,363	366.5%
Total	74,483,245	68,873,353	5,609,892	8.1%

Total produksi meningkat antara tahun 2011 dan 2012 berkat lapangan Kitan yang mulai berproduksi pada 11 Oktober 2011. Kami mencatat penurunan produksi Bayu Undan, sebagian besar disebabkan oleh gangguan rencana pemeliharaan (outage) pada tahun 2012.

Produksi “Dalam Jenis”

Tidak seperti negara lain, produksi yang dialokasikan ke negara tuan rumah (host) dapat berupa (In-Kind) hak produksi RDTL yang dijual adalah dalam bentuk dolar.

Nilai Produksi

Nilai Produksi dalam barel ekuivalen ditentukan berdasarkan realisasi harga rata-rata tahun 2012 dibandingkan terhadap total volume yang diproduksi untuk tahun anggaran tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa nilai produksi adalah perkiraan kasar yang berasal dari total produksi dikalikan dengan harga rata-rata, ini hanya memberikan nilai indikatif. Pendapatan yang sebenarnya dikumpulkan adalah disajikan dalam Bagian 2.2 laporan ini.

ANP telah menerbitkan di situsnya Lafaek Database yang berisi informasi terkait Bayu-Undan dan produksi lapangan Kitan, kontrak, dll. Informasi ini dapat diakses publik.

2.4. Data Lengkap dan Akurat

- Jadwal pembayaran yang dilakukan kepada Entitas Pemerintah, dibagi oleh perusahaan digunakan sebagai dasar rekonsiliasi kita. Semua pembayaran telah dipilih dan disetujui oleh MSWG itu termasuk dalam rekonsiliasi.
- Daftar perusahaan ekstraktif yang dipilih MSWG untuk melakukan rekonsiliasi tahun 2012 mencakup 20 perusahaan Minyak dan Gas.
- 17 perusahaan Minyak dan Gas yang masuk dalam ruang lingkup rekonsiliasi telah menyesuaikan templat laporan mereka. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan Minyak dan Gas	Perusahaan Minyak dan Gas
Woodside Petroleum	Oilex Ltd
Eni JPDA 03-13 Ltd	ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd
Eni Timor Leste S.p.A.	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd
Talisman Resources (JPDA 06-105) Pty Ltd	ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd
Tokyo Timor Sea Resources	ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd
Inpex Sahul Ltd	ConocoPhillips JPDA Pty Ltd
Inpex Timor Sea Ltd	AusAid
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	

¹Sumber: ANP

- 3 Perusahaan Minyak dan Gas termasuk dalam lingkup rekonsiliasi belum mengembalikan templat pelaporan mereka. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan Minyak dan Gas	Perusahaan Minyak dan Gas
Reliance Exploration & Production	Minza Oil and Gas Ltd
Japan Energy Corporation	

- Seluruh Entitas Pemerintah yang masuk dalam ruang lingkup rekonsiliasi telah mengembalikan templat laporan rekonsiliasi.
- Atas dasar ini, kita dapat menyimpulkan secara rasional bahwa laporan ini mencakup semua pembayaran yang signifikan dibuat pada tahun 2012, oleh perusahaan ekstraktif terhadap pendapatan negara.

2.5. Pembayaran Rekonsiliasi

- Selisih bersih (net) antara pembayaran yang diumumkan oleh perusahaan Minyak, Gas dan Entitas Pemerintah, pada awal rekonsiliasi sebesar **USD (20.130.037)** atau **0,53%** dari jumlah total yang diumumkan oleh Pemerintah, yang dirinci sebagai berikut:

Jumlah dalam USD

	Perusahaan Minyak dan Gas	Entitas Pemerintah	Perbedaan	%
Total Pembayaran	3,766,808,872	3,786,938,909	(20,130,037)	-0.532%

- Pada akhir rekonsiliasi kami, selisih bersih yang tersisa sebesar **USD (235.365)** atau **0,001%** dari total pembayaran yang dinyatakan oleh Pemerintah. Perbedaan ini berkaitan dengan templat laporan yang tidak dilaporkan oleh perusahaan ekstraktif.

Jumlah dalam USD

	Perusahaan Minyak dan Gas	Entitas pemerintah	Perbedaan	%
Total Pembayaran	3,789,307,910	3,789,543,275	(235,365)	-0.001%

- Setelah penyesuaian, selisih bersih **USD (235.365)** mewakili agregat positif selisih sebesar **USD 3.201** dan selisih negatif sebesar **USD (238.566)** yang dirinci dalam bagian 6.4 laporan ini.
- Rincian penyesuaian yang dilakukan terhadap jumlah awal entitas pelapor dan sisa yang belum diselesaikan. Perbedaan disajikan dalam bagian 6.3 laporan ini.
- Kami menyajikan dalam tabel di bawah ringkasan perbedaan yang tidak direkonsiliasi oleh perusahaan setelah melakukan rekonsiliasi:

Jumlah dalam USD

Perusahaan	Perusahaan Minyak dan Gas	Entitas Pemerintah	Perbedaan
Minza Oil and Gas Ltd	-	176,842	(176,842)
Japan Energy Corporation	-	33,865	(33,865)
Reliance Exploration & Production	-	26,577	(26,577)
Perbedaan non material yang berkaitan dengan perusahaan lain	3,789,307,910	3,789,305,991	1,918
Total Pembayaran	3,789,307,910	3,789,543,275	(235,365)

Perbedaan yang tidak direkonsiliasi terutama disebabkan oleh perusahaan yang tidak menyerahkan templat laporan meskipun sudah mengigit beberapa kali.

- Kami sajikan dalam tabel di bawah ringkasan perbedaan yang tidak direkonsiliasi dengan pembayaran dan oleh Badan Pemerintah setelah melakukan rekonsiliasi:

Jumlah dalam USD

Aliran Pendapatan (Revenue stream)	Perusahaan Minyak dan Gas	Entitas Pemerintah	Perbedaan (Selisih)
Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (DNPPM)	1,599,985,963	1,600,142,732	(156,768)
Penghasilan Pajak (Income Tax)	781,512,843	753,993,293	27,519,550
Nilai Tambah Pajak (Value Added Tax)	17,951,684	17,998,392	(46,708)
Pemotongan Pajak (Withholding Tax)	29,730,955	18,379,423	11,351,532
Pajak Keuntungan Tambahan (Additional Profit Tax)	535,106,585	535,106,225	360
Pajak Lainnya (Upah karyawan)	8,576,007	8,598,322	(22,315)
Pajak Tambahan (Additional Tax)	227,107,888	266,067,076	(38,959,188)
Autoridade Nacional Petroleo (ANP)	2,180,687,547	2,180,766,143	(78,597)
Royalti FTP : Minyak / Gas & Keuntungan Minyak / Gas	2,174,667,172	2,174,665,768	1,403
JPDA - Biaya Pengembangan	4,897,750	4,897,750	-
JPDA - Biaya Kontrak Servis	880,000	960,000	(80,000)
TLEA - Biaya Sewa Lisensi / Permukaan	242,625	242,625	-
Banco Central Timor-Leste (BCTL)	8,634,400	8,634,400	-
Biaya saluran pipa (AusAid)	8,634,400	8,634,400	-
Total pembayaran Dasar	3,789,307,910	3,789,543,275	(235,365)



Tim Woodward
Partner
Moore Stephens LLP

150 Aldersgate Street
London EC1A 4AB

24 June 2015

3. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Sebelum meminta data untuk proses rekonsiliasi tahun 2012, kami melakukan review terhadap ruang lingkup laporan EITI yang disetujui oleh MSWG. Kami juga menyiapkan instruksi tertulis yang menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan dan mengirimkan templat pelaporan.

3.1. Rapat Pembukaan

Penugasan kami dimulai pada 22 September 2014 dimulai dengan rapat pembukaan dengan Sekretariat TL-EITI, rapat itu kami berdiskusi tentang:

- ✦ membahas tujuan penugasan;
- ✦ meminta semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk ruang lingkup kerja;
- ✦ menjadwalkan semua wawancara yang akan dilakukan dengan orang-orang kunci dari entitas pemerintah dan perusahaan ekstraktif.

3.2. Tahap Permulaan

Sesuai dengan kerangka acuan kami, kami melakukan analisis awal terhadap proses pelaporan EITI untuk memastikan bahwa ruang lingkup telah didefinisikan dengan jelas, termasuk templat pelaporan, prosedur pengambilan data, dan jadwal penerbitan laporan EITI. Pekerjaan kami termasuk ulasan tentang:

- ✦ ambang batas materialitas untuk penerimaan dan pembayaran;
- ✦ pajak dan pendapatan yang akan ditanggung;
- ✦ perusahaan dan Badan Pemerintah wajib lapor; dan
- ✦ jaminan yang harus diberikan oleh entitas pelapor untuk memastikan kredibilitas data yang disediakan untuk kita.

3.2.1. Rapat dengan Pihak Berwenang dan Perusahaan

Kami melakukan wawancara dengan pejabat kunci dari entitas pemerintah dan perusahaan. Selama pertemuan itu, kami menjelaskan bahwa tahap ini akan melibatkan pemahaman dan pendokumentasian nilai industri ekstraktif RDRTL, mendirikan praktik dan sistem pajak yang mapan, serta arus pembayaran di dalam industri ekstraktif serta identifikasi seluruh perusahaan ekstraktif dan entitas pemerintah yang terlibat.

Selain itu, kami dapat mengidentifikasi berbagai jenis pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ekstraktif, pada dasarnya informasi yang tersedia dalam berbagai administrasi dan prosedur yang diterapkan. Berbagai administrasi dan entitas publik yang dihubungi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Organisasi	Nama	Fungsi
RDRTL- Sekretariat EITI	Elda Guterres da Silva	Nasional Koordinator
	Trifonio Flor Sarmento	Staf Desiminasi
	Ana Paula de Araujo	Asistent Administrasi
	Sonia do Rosario Boavida	Staf Administrasi
Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral	Alfredo Pires	Mentri Perminyakan dan Sumberdaya Mineral
	Elga Anita Torrezao Pereira	Direktur Nasional Mineral
Autoridade Nacional Petroleo (ANP)	Emanuel Angelo Lay Oscar Sanches Faria	Direktur Pemasaran Staf Senior – Keuangan & Asuransi Fiskal
Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (DNPPM)	Agostinho Gregorio Ramos Filipe Nery Bernardo	Staf Senior dan Kepala Departamen Kepatuhan (Compliance) Analisis Dana Perminyakan
Banco Central Timor-Leste	Fernando da Silva Carvalho	Kepala Akuntan
Direktorat General Estatistik (DGE)	Paulina Rita Cruz Viegas	Direktur Nasional Ekonomi dan Statistik Sosial

Kami juga mengadakan pertemuan dengan perusahaan operasi besar di sektor Minyak dan Gas di RDTL dan membahas tentang jenis pembayaran yang dibayarkan kepada Pemerintah dan persiapan prosedur yang diterapkan pada deklarasi pajak dan mengumpulkan penerimaan pajak. Kami juga meninjau masalah yang dihadapi saat melakukan rekonsiliasi selama tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa informasi yang diminta dalam templat pelaporan tersedia.

Perusahaan yang dikunjungi selama tahap awal kami adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nama	Fungsi
Woodside	Antonio Campos dos Santos	Perwakilan Negara (Country Representative) dan Penasehat Hubungan Masyarakat
Eni	Angelina Baptista Branco	Perwakilan Negara (Country Representative)
TIMOR-GAP	Luis Martins	Direktur Bisnis dan Pembangunan
	Jacinta Paula Bernardo	Direktur Layanan Perusahaan
	Francisco Alegria	Penasehat Hubungan Publik dan Presiden / CEO

3.2.2. Koleksi Data dan Analisis

Setelah wawancara yang diadakan dengan entitas yang disebutkan di atas, kami memperoleh data yang menjadi dasar analisis awal kami untuk sektor industri ekstraktif di RDTL.

Untuk memahami dan mendokumentasikan skala sektor ekstraktif RDTL, sistem pajak dan arus pembayaran, kami mengumpulkan dokumen yang relevan dan memperoleh pemahaman tentang hal-hal berikut:

- ✦ peraturan yang berlaku untuk sektor ekstraktif;
- ✦ struktur sektor ekstraktif di RDTL, menentukan skalanya dan pemangku kepentingan utama;
- ✦ statistik dan indikator keuangan sektor ekstraktif dalam hal produksi dan kontribusi dalam kinerja pendapatan RDTL;
- ✦ semua perubahan yang terjadi selama masa rekonsiliasi yang berkaitan dengan undang-undang, kontrak baru atau perjanjian yang dapat berdampak pada sektor ekstraktif; dan
- ✦ kesimpulan utama dan isu-isu yang diangkat dalam laporan rekonsiliasi sebelumnya.

Untuk mengidentifikasi semua aliran pembayaran serta entitas terkait di sektor ekstraktif, kami melakukan sebagai berikut:

- ✦ pemungutan semua penerimaan yang dilakukan oleh negara dari perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif;
- ✦ data rekonsiliasi yang dikumpulkan dari sampel perusahaan ekstraktif dengan yang disediakan oleh entitas pemerintah;
- ✦ memeriksa daftar perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup rekonsiliasi tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan perbandingan antara semua tahun fiskal;
- ✦ konsolidasi pendapatan yang dipungut oleh entitas pemerintah menurut jenis aliran dan perusahaan; dan
- ✦ perhitungan dampak hasil konsolidasi terhadap analisis materialitas.

3.3. Proses Rekonsiliasi

3.3.1. Pengumpulan (gathering) Data

Templat pelaporan yang disiapkan dan disetujui oleh MSWG dikirim ke perusahaan ekstraktif dan entitas pemerintah untuk melaporkan semua data yang diperlukan. Templat pelaporan ini dikirim oleh Independent Rekonsiliasi secara elektronik kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan dan entitas pemerintahan diwajibkan untuk melapor langsung kepada rekonsiliator, kepada siapa saja mereka juga diminta untuk bertanya apa pun tentang templat pelaporan.

3.3.2. Kompilasi Data dan Penyelesaian/Resolusi dari Perbedaan

Proses pengumpulan data dan penyelesaian atau membenaran perbedaan yang dilakukan selama bulan November dan Desember 2014. Dalam melakukan rekonsiliasi, kami melakukan prosedur sebagai berikut:

- ✦ angka yang dilaporkan oleh perusahaan Minyak dan Gas dibandingkan item demi item dengan angka yang dilaporkan oleh entitas pemerintah. Akibatnya, semua perbedaan yang teridentifikasi telah dicantumkan item demi item hubungan dengan masing-masing entitas pemerintah dan perusahaan ekstraktif;
- ✦ dimana data yang dilaporkan oleh perusahaan Migas sesuai dengan data yang dilaporkan oleh entitas pemerintah, angka pemerintah dianggap telah dikonfirmasi dan tidak ada tindakan yang dilakukan lebih lanjut; dan
- ✦ Entitas pemerintah dan perusahaan diminta untuk memberikan dokumen pendukung dan/atau konfirmasi untuk setiap penyesuaian terhadap informasi yang diberikan pada proses pengumpulan data templat asli.

Jika kami tidak dapat menyelesaikan perbedaan, kami meminta dokumen pendukung tambahan untuk membuktikan pembayaran yang diumumkan. Dalam kasus-kasus tertentu, perbedaan-perbedaan ini tetap tidak terselesaikan, yang telah kami ringkas dalam bagian 6.4 laporan ini.

3.4. Keandalan dan Kredibilitas Data EITI

Untuk mematuhi standar EITI dan untuk memastikan keandalan dan kredibilitas data yang diserahkan:

- ✦ perusahaan dan entitas pemerintahan diminta untuk mengirimkan templat pelaporan yang ditandatangani oleh pejabat senior untuk membuktikan bahwa templat pelaporan sudah lengkap dan berdasarkan catatan yang akurat; dan
- ✦ semua pendapatan yang dinyatakan oleh entitas pemerintah diperiksa dengan berbagai laporan audit yang dihasilkan terkait dengan sektor perminyakan di RDTL.

Atas dasar itu, kami dapat menyimpulkan secara wajar bahwa laporan ini mencakup informasi yang andal dan kredibel tentang pendapatan yang dihasilkan oleh sektor ekstraktif di Timor-Leste.

3.5. Dasar dari Laporan

Rekonsiliasi dilakukan secara tunai. Dengan demikian, pembayaran dilakukan sebelum 1 Januari 2012 telah dikecualikan. Hal yang sama berlaku untuk pembayaran yang dilakukan setelah 31 Desember 2012.

4. TINJAUAN SEKTOR EKSTRAKTIF DI RDTL

4.1. Sektor Minyak dan Gas

4.1.1. Latar Belakang dan Profil Sektor Minyak dan Gas di RDTL

RDTL secara resmi memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Kemerdekaan RDTL merupakan hasil referendum pada bulan Agustus 1999 yang disponsori oleh PBB. Sebelum tahun 2002, pemerintahan RDTL diambil alih oleh PBB melalui pemerintahan transisi PBB di Timor Leste (UNTAET). Selama masa transisi, UNTAET mewakili pemerintah RDTL melakukan negosiasi kembali mengenai pembagian sumber daya minyak bumi dalam kawasan Joint Petroleum Development Area (JPDA).

Pada tahun 2003, RDTL dan Australia mendirikan Timor Sea Treaty (TST) yang menyediakan susunan kerja untuk semua eksplorasi dan pengembangan minyak bumi di JPDA. TST menetapkan bahwa pendapatan perpajakan hulu dari produksi minyak bumi di JPDA dibagi antara Timor-Leste dan Australia berdasarkan 90/10.

TST membentuk Joint Commission (JC) untuk menetapkan kebijakan dan peraturan untuk kegiatan perminyakan di JPDA, bersama dengan pembentukan otoritas yang ditunjuk oleh Timor Sea Designated Authority (TSDA). Kemudian digantikan oleh Zone Cooperation Area (ZOCA) di bawah periode Timor Gap.

TSDA dipimpin oleh seorang direktur eksekutif untuk mengelola kegiatan perminyakan di JPDA. Komisi bersama terdiri dari minimal satu perwakilan Australia dan dua perwakilan Timor.

Autoridade Nacional Petroleo (ANP) didirikan berdasarkan Keputusan n°20/2008. Lembaga publik ini mengelola semua eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di kedua yurisdiksi yaitu JPDA dan TLEA (Timor-Leste Exclusive Area).

4.1.2. Konteks Hukum

Sektor Minyak dan Gas RDTL terdiri dari 2 (dua) yurisdiksi yang berbeda dengan susunan hukum yang relevan: TLEA dan JPDA.

Tabel di bawah ini merangkum kerangka hukum untuk setiap yurisdiksi:

YURIDIKSI	TLEA	JPDA
Gambaran umum	TLEA mengacu pada wilayah RDTL sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang perminyakan (UU No.13/2005) dari RDTL. Undang-Undang ini mengatur bahwa operasi perminyakan di laut teritorial, bersama dengan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya di mana, menurut hukum internasional, RDTL memiliki hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak buminya tetapi tidak termasuk wilayah darat.	TST antara pemerintah RDTL dan Australia pada tahun 2002 mendirikan JPDA di Laut Timor. Berdasarkan perjanjian tersebut RDTL dan Australia bersama-sama mengendalikan, mengelola, dan memfasilitasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak bumi di JPDA untuk kepentingan masyarakat RDTL dan Australia
Susunan hukum utama operasi perminyakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Kegiatan Perminyakan (UU N°13/2005) 2. Autoridade Nacional Petroleo (ANP) (Keputusan-UU N°2/2008) 3. Tender Publik Sehubungan dengan Minyak Bumi Penghargaan Kontrak (Surat Keputusan N°7/2005) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TST 2. Kode Pertambangan Minyak Bumi Sementara (IPMC) 3. Kode Pertambangan Minyak Bumi (PMC). 4. Peraturan Sementara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 37 Kode Pertambangan Minyak Bumi Sementara 5. Arahan Sementara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 37 Kode Pertambangan Minyak Bumi Sementara 6. Pedoman Administratif Sementara untuk JPDA 7. Greater Sunrise - Perjanjian Unitisasi Internasional 8. Greater Sunrise - Nota Kesepahaman
Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSCs)	TLEA PSC S-06-03 (Kontrak Area C) / TLEA PSC S-06-04 (Kontrak Area D) / TLEA PSC S-06-05 (Kontrak Area E)	JPDA PSC 06-101 A / JPDA PSC 06-103 / JPDA PSC 06-105 / JPDA PSC 11-106 / JPDA PSC 03-12 / JPDA PSC 03-13 JPDA PSC 03-19 / JPDA PSC 03-20

Autoridade Nacional Petroleo (ANP) (Keputusan N°2/2008)¹

Mengingat sumber daya minyak bumi yang dimiliki oleh RDTL merupakan komponen strategis perekonomiannya, dan berpotensi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jika sumber daya tersebut dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan yang signifikan dan manfaat langsung bagi perekonomian negara. Pemerintah RDTL membentuk ANP untuk menetapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang diberlakukan mencakup eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi, dan distribusi sumber daya minyak bumi dan gas alam.

ANP adalah lembaga publik yang diberikan otonomi administratif dan keuangan, anggaran dan hak milik sendiri, yang mematuhi susunan peraturan yang mengatur administrasi keuangan lembaga otonom yang dibiayai sendiri. Tujuan ANP adalah untuk bertindak sebagai otoritas pengatur untuk minyak dan gas bumi dan industri produk terkait, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kegiatan Perminyakan, PMC dan TST.

ANP telah mempersiapkan peraturan teknis lepas pantai untuk area TLEA untuk memastikan pedoman yang tepat tentang keselamatan kesehatan dan lingkungan dan operasi yang aman. Di sektor Hilir, ANP juga merampungkan Undang-Undang Hilirisasi, Peraturan tentang bisnis hilirisasi.

Sebagian besar kegiatan mengenai pengeboran telah dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2012, tidak ada eksplorasi signifikan yang dilakukan oleh operator di kedua yurisdiksi. Operator di kedua wilayah yurisdiksi sebagian besar terkonsentrasi pada studi seismik, geologi dan geofisika 3D.

ANP Lafaek Database telah dapat diakses publik sejak 2008 yang berisi informasi tentang kontrak, koordinat area lisensi, durasi lisensi termasuk data produksi pada pembaruan mingguan. Untuk tujuan pengungkapan kontrak.

Tender Publik sehubungan dengan Penghargaan Kontrak Perminyakan di TLEA

Keputusan N°7/2005 menetapkan prosedur umum untuk melakukan tender publik sehubungan dengan pemberian area kontrak dan menandatangani kontrak minyak bumi. Tabel di bawah ini merangkum yang utama ketentuan Undang-undang Keputusan tentang Pelelangan Umum Sehubungan dengan Penghargaan Kontrak Perminyakan:

REFERENSI	Ketentuan utama / Rincian
Pasal 3 kontrak minyak bumi	1. Kontrak minyak bumi yang akan dibuat dengan perusahaan dan/atau kelompok perusahaan tertentu harus berbentuk Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC).
Pasal 4 Penawaran	1. Perusahaan dan/atau kelompok perusahaan harus dipilih berdasarkan penawaran yang diajukan.
Pasal 6 Periklanan untuk pemberitahuan publik	1. Peluncuran tender publik sehubungan dengan penghargaan kontrak perminyakan harus diiklankan dengan pemberitahuan publik sementara, untuk dipublikasikan dalam berita resmi, dan di media sebagai Menteri Peluncuran tender semacam itu 2. Pemberitahuan final dan definitif, yang juga harus dipublikasikan dalam berita resmi, dan di media yang dianggap tepat oleh MPRM, harus dipublikasikan selambat-lambatnya 45 hari sebelum batas waktu pengajuan penawaran.
Pasal 8 Komite Evaluasi (assessment)	1. Penilaian penawaran yang diajukan akan dilakukan oleh Komite Penilai ("Komite") terdiri dari anggota berjumlah ganjil, tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 9 2. Anggota Komite ditunjuk oleh MPRM dan termasuk Direktur Perminyakan, Gas dan Energi. 3. Keputusan komite diambil dalam sidang pleno dengan suara terbanyak, dengan kuorum dua pertiga Persyaratan
Pasal 12 Notifikasi dan Publikasi	1. Hasil penilaian penawaran diberitahukan kepada penawar dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan laporan 2. Keputusan yang menyetujui laporan, catatan singkat tentang hasil penilaian penawaran dan ringkasan substansial dari laporan tersebut harus dipublikasikan dalam berita resmi, dan di media yang dianggap tepat oleh MPRM, dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal persetujuan.

¹ Sumber: Dekrit-Hukum no. 20/2008 Berhubungan dengan ANP.

² Sebelumnya Dikenal sebagai Menteri Kebijakan Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi (MKSDAME)

Referensi	Ketentuan utama / Rincian
-----------	---------------------------

Pasal 13 Tantangan (Challenge)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penawar untuk area kontrak tertentu dapat mengajukan klaim terhadap keputusan persetujuan mengenai area kontrak tersebut dengan MPRM, dan hak untuk melakukannya harus dilaksanakan dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal publikasi. 2. Klaim harus diajukan secara tertulis, bersama dengan indikasi alasannya. 3. Semua penawar lain untuk area kontrak harus diberitahu tentang isi klaim agar mereka dapat, jika mereka menginginkannya, membuat pernyataan dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima pemberitahuan. 4. Keputusan mengenai klaim harus dibuat dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal berakhirnya batas waktu yang disebutkan dalam sub-pasal 13.3, dengan indikasi alasannya dan mencakup klaim dan / atau tuduhan yang mungkin telah dibuat oleh penawar lain. 5. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.4, dan alasannya, dipublikasikan dalam berita resmi, dan di media yang dianggap tepat oleh MPRM, dalam waktu 15 hari kerja sejak tanggal keputusan dibuat.
--------------------------------	--

Perjanjian Laut Timor (TST) yang mengatur Joint Petroleum Development Area (JPDA)

TST ditandatangani pada 20 Mei 2002 dan mendirikan JPDA. RDTL dan Australia harus bersama-sama mengendalikan, mengelola, dan memfasilitasi eksplorasi:

REFERENSI	Ketentuan utama / Rincian
Pasal 4: Pembagian produksi minyak bumi	RDTL dan Australia berhak atas semua minyak bumi yang diproduksi di JPDA di mana 90% akan menjadi milik Timor-Leste dan 10% akan menjadi milik Australia.
Pasal 22 Jangka waktu perjanjian	TST berlaku sampai ada batas dasar laut permanen antara RDTL dan Australia atau untuk 50 tahun sejak tanggal berlakunya, mana yang lebih cepat. Perjanjian ini dapat diperbaharui dengan kesepakatan antara RDTL dan Australia.

Peraturan Pertambangan Minyak Sementara (PMC Sementara)

PMC Interim mengatur kegiatan perminyakan di JPDA. Terlepas dari kenyataan bahwa PMC didirikan, PMC Sementara terus mengatur PSC berikut:

PSC	Operator	Masa Berlaku
03-12	ConocoPhillips	06/02/2022
03-13	ConocoPhillips	17/12/2021
03-19	Woodside Petroleum	03/10/2026
03-20	Woodside Petroleum	15/11/2026

Tabel di bawah ini merangkum artikel utama yang terkait dengan PMC sementara:

Referensi	Ketentuan utama / Rincian
Pasal 4 Hak yang diberikan pada kontrak	PSC juga harus menentukan dalam waktu 30 hari setelah akhir setiap tahun kalender, penyesuaian dan penyelesaian tunai antara kontraktor dan otoritas yang ditunjuk harus dilakukan berdasarkan jumlah, dan harga aktual yang terlibat, untuk memastikan bahwa otoritas yang ditunjuk menerima bagian yang benar dari produksi minyak bumi untuk setiap tahun kalender.
Pasal 17 Persetujuan untuk memproduksi minyak bumi	Operator kontrak tidak boleh membangun struktur produksi apa pun tanpa persetujuan dari otoritas yang ditunjuk. Otoritas yang ditunjuk tidak boleh secara tidak masuk akal menahan persetujuan
Pasal 18 Persetujuan untuk membangun pipa	Operator kontrak tidak boleh membangun pipa untuk tujuan pengangkutan minyak bumi di dalam atau dari JPDA tanpa persetujuan dari Komisi Bersama (JC), juga tidak boleh operator kontrak mengoperasikan atau menghapus pipa itu tanpa persetujuan JC.
Pasal 32 Persetujuan calon pelanggan	Otoritas yang ditunjuk dapat mengeluarkan persetujuan calon pelanggan kepada siapa pun untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi di blok bukan di area kontrak. Persetujuan calon pelanggan harus menentukan bahwa kondisi di mana orang tersebut harus tunduk. Ketentuan persetujuan calon pelanggan tidak boleh termasuk preferensi atau hak apa pun untuk menandatangani kontrak atas blok tersebut. Semua laporan data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut harus diserahkan kepada otoritas yang ditunjuk untuk penggunaan gratisnya sendiri.
Pasal 41 Audit pembukuan dan rekening kontraktor	Pembukuan dan rekening kontraktor harus diaudit oleh otoritas yang ditunjuk, yang harus dilakukan setiap tahun. Otoritas yang ditunjuk dapat mengeluarkan peraturan dan arahan sehubungan dengan audit buku dan akun.

¹ Durasi ini awalnya selama 30 tahun. Namun diperpanjang hingga 50 tahun oleh Certain Maritime Arrangements di Laut Timor (CMATS), Pasal 3.

² Sumber: Interim Petroleum Mining Code, Pasal 7

Referensi	Ketentuan utama / Rincian
-----------	---------------------------

Pasal 48 Pengakhiran kontrak	Apabila kontraktor belum mematuhi ketentuan PMC ini, maka peraturan dan arahan dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk, atau ketentuan kontrak, otoritas yang ditunjuk dapat merekomendasikan kepada JC agar kontrak diakhiri. Otoritas yang ditunjuk akan memberikan waktu 30 hari ¹ pemberitahuan tertulis kepada kontraktor tentang niat otoritas yang ditunjuk untuk merekomendasikan penghentian kontrak.
------------------------------	---

Kode Pertambangan Minyak Bumi (PMC)

PMC diadopsi sesuai dengan Pasal 7(a) TST untuk mengatur eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi Minyak Bumi di dalam JPDA, serta ekspor Minyak Bumi dari JPDA. PMC dicabut dan PMC sementara yang tetap berlaku hanya sehubungan dengan PSC sebagaimana dimaksud di atas. Proses pemberian kontrak mirip dengan yang disediakan oleh PMC Sementara tetapi dengan perubahan dikutip di bawah ini:

- proposal pemohon harus berkenaan dengan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan ; dan
- proposal pelamar harus sehubungan dengan Pelatihan dan Ketenagakerjaan, dan Barang dan Jasa Lokal.

Jika tidak, PMC tidak memberikan angka untuk biaya yang bertentangan dengan PMC Interim.

Greater Sunrise - International Unitisation Agreement (IUA)

IUA Greater Sunrise mengatur aktivitas minyak bumi di Unit Area dan Unit Reservoir: Deposit Sunrise dan Troubadour, yang secara kolektif dikenal sebagai Greater Sunrise).

Tabel di bawah ini merangkum artikel utama yang terkait dengan Greater Sunrise IUA

Referensi	Ketentuan utama / Rincian
Pasal 7 Pembagian Unit Minyak Bumi	Produksi Minyak Bumi dari Unit Reservoir harus dibagi antara JPDA dan Australia sesuai dengan Apportionment Ratio 20,1 / 79,9, dengan masing-masing 20,1.
Pasal 4 Penerapan Hukum	a) TST dianggap berlaku untuk kegiatan perminyakan dalam JPDA dan kegiatan perminyakan yang dikaitkan kepada JPDA sesuai dengan Apportionment Ratio; b) Undang-undang Australia akan dianggap berlaku untuk kegiatan perminyakan yang dikaitkan dengan Australia sesuai dengan Apportionment Ratio
Pasal 11 Perpajakan Menerapkan dalam kaitannya ke Unit Properti	Untuk keperluan perpajakan perusahaan, perpajakan sumber daya, pemulihan biaya dan pembagian produksi sehubungan dengan Unit Properti : a) penerimaan dan pengeluaran untuk bagian produksi yang dikaitkan dengan JPDA sesuai dengan Rasio Pembagian akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam Perjanjian Laut Timor dan di tempat lain dalam IUA; b) penerimaan dan pengeluaran untuk bagian produksi yang dikaitkan dengan Australia sesuai dengan Apportionment Ratio akan dikenakan pajak sesuai dengan pengaturan perpajakan domestik Australia.
Pasal 12 Rencana Pengembangan	Produksi minyak bumi tidak akan dimulai sampai Rencana Pembangunan untuk eksploitasi yang efektif dari Unit Waduk, yang telah diajukan oleh Unit Operator dan berisi program dan rencana disepakati sesuai dengan Perjanjian Joint Ventures, telah disetujui oleh Peraturan Pihak berwenang. Penyelenggara Unit harus menyerahkan salinan Rencana Pembangunan kepada Pihak Pengatur untuk persetujuan.

Greater Sunrise - Memorandum of Understanding (MoU)

MoU Greater Sunrise menetapkan nilai biaya yang berkaitan dengan Unitisasi Greater Sunrise yang akan ditransfer oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah RDTL. Biaya ini ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

Tanggal Jatuh Tempo Biaya	Biaya dalam (USD)	Catatan	Frekuensi	Komentar
Pada awal pemasangan	1,000,000	Di pakai bebas Amerika Serikat	Setiap tahun	Pengalihan jumlah ini akan dimulai pada tahun di mana pemasangan fasilitas di Unit Area untuk

¹ Unit Area dan Unit Reservoir berarti area yang dijelaskan dalam Lampiran I Greater Sunrise - Unitisasi Internasional Perjanjian (IUA).

² Berdasarkan ANP, sampai sekarang tidak ada pendapatan yang diterima dari pemerintah Australia

Tanggal Jatuh Tempo Biaya	Biaya masuk USD	Catatan	Frekuensi	Komentar
fasilitas di Unit Area		mata uang bebas dari biaya pertukaran dan layanan		Tujuan produksi dimulai atau lima tahun sebelum produksi dari Unit Area dijadwalkan berdasarkan Rencana Pengembangan. Transfer ini berlanjut setiap tahun setelahnya, hingga dan termasuk tahun di mana produksi dari Unit Area dimulai
Pada awalnya produksi di Satuan Wilayah	10,000,000	Di pakai bebas Mata uang AS bebas dari pertukaran dan pelayanan biaya.	Setiap tahun	Transfer jumlah ini akan dimulai pada kalender tahun dimulainya produksi dari Unit Area, dan berlanjut setiap tahun sesudahnya sampai tetapi tidak termasuk tahun kalender dimana produksi dari Unit Area berhenti.

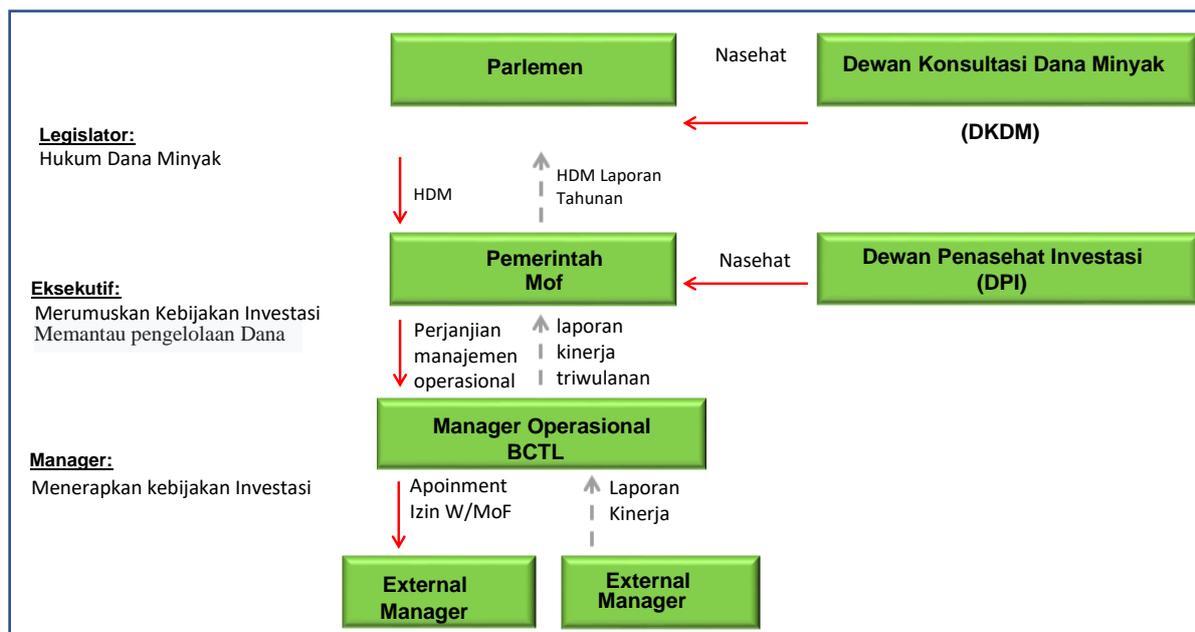
Dana Perminyakan (DP)

DP didirikan pada tahun 2005 dalam konteks Konstitusi RDTL melalui Pasal 139 yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dana Perminyakan harus berkontribusi pada pengelolaan sumber daya minyak bumi yang bijaksana manfaat dari generasi saat ini dan masa depan. Ini akan menjadi alat yang berkontribusi pada kebijakan fiskal yang sehat, di mana pertimbangan dan bobot yang tepat diberikan untuk kepentingan jangka panjang warga Timor-Leste.

Tabel di bawah ini merangkum artikel utama yang terkait dengan undang-undang DP

Referensi	Ketentuan utama / Rincian
Pasal 6 Dana Perminyakan (DP)	Tanda terima DP adalah sebagai berikut: a) Penerimaan Bruto, termasuk Penerimaan Pajak RDTL dari setiap operasi perminyakan, termasuk prospeksi atau eksplorasi, dan pengembangan dan eksploitasi, transportasi, penjualan atau ekspor minyak bumi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengannya. b) Setiap jumlah yang diterima oleh RDTL dari otoritas yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian. c) Setiap jumlah yang diterima oleh RDTL dari Investasi Penerimaan Dana Perminyakan. Setiap jumlah yang diterima oleh RDTL dari partisipasi langsung atau tidak langsung RDTL dalam operasi Perminyakan. d) Setiap jumlah yang diterima oleh RDTL yang berkaitan langsung dengan sumber daya minyak bumi yang tidak tercakup dalam § a dan b di atas.
Pasal 7 Transfer	Jumlah total yang ditransfer dari DP untuk tahun fiskal tidak boleh melebihi jumlah alokasi yang disetujui oleh Parlemen untuk Tahun anggaran. Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (EPB) untuk tahun anggaran adalah jumlah maksimum yang dapat diambil dari DP pada tahun anggaran tersebut. $EPB = \text{Kekayaan minyak bumi} * 3\%$

Struktur tata kelola DP disajikan sebagai berikut:



¹ Sumber: Undang-undang no. 9/2005, 3 Agustus 2005 mengenai Dana Perminyakan

² Sumber: Laporan tahunan Dana Perminyakan, 2013

4.1.3. Produksi

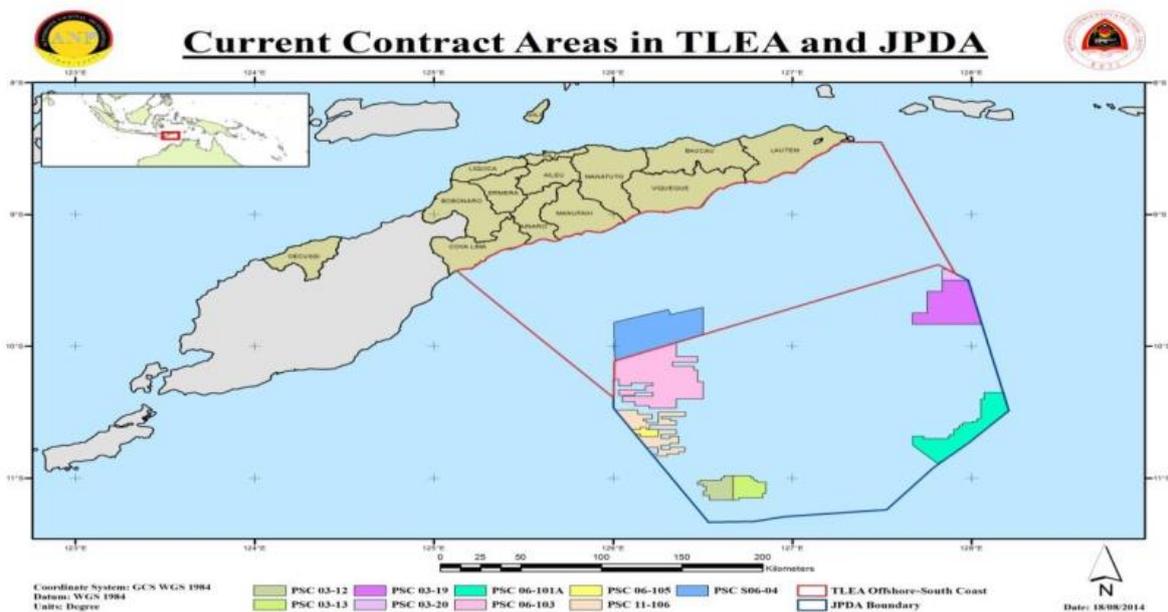
Pada akhir 2012, ada dua (2) lapangan produksi di JPDA, sementara di TLEA, belum ada penemuan komersial.

Tabel di bawah ini merangkum karakteristik kedua lapangan produksi:

No	Lapangan	Operator	Perusahaan patungan (Joint Venture)
1	Bayu-Undan	ConocoPhillips	ENI / Santos / INPEX / Tokyo Timor Sea Resources Pty
2	Kitan	ENI	INPEX Timor Sea Ltd / Talisman Resources Pty Ltd

- Sumber: Undang-undang no. 9/2005, 3 Agustus 2005 Mengenai Dana Perminyakan.
- Sumber: Laporan tahunan Dana Perminyakan, 2013.

Peta di bawah ini menunjukkan wilayah kontrak di TLEA dan JPDA pada akhir tahun 2012:



4.1.4. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Perekonomian

PDB RDTL bergantung pada pendapatan dari Minyak dan Gas. Tabel di bawah ini merangkum perbedaan PDB RDTL yang dibagi berdasarkan sektor:

Data PDB1	2012		2011		Perbedaan	
	USD Juta	%	USD Juta	%	USD Juta	%
PDB sektor minyak	4,309	77%	4,604	80%	(295)	6%
PDB sektor non-migas	1,270	23%	1,123	20%	147	13%
Total PDB	5,579	100%	5,727	100%	(147)	3%

Pendapatan minyak dan gas telah melonjak sejak 2005 melalui proyek-proyek besar di JPDA yang RDTL berbagi dengan Australia. Pemerintah RDTL membentuk Dana Perminyakan (DP) khusus pada tahun 2005 untuk memfasilitasi penggunaan pendapatannya secara berkelanjutan dalam waktu panjang.

¹ Neraca Nasional Timor-Leste 2000-2012, Statistik dan Analisis. Angka dalam harga saat ini.

Ekspor / Impor

Tabel di bawah ini merangkum perbedaan ekspor dan impor menurut sektor:

Ekspor / Impor data ¹	2012		2011		Variasi	
	USD Juta	%	USD Juta	%	USD Juta	%
Ekspor Sektor Minyak	5,035	97%	5,176	98%	(141)	(3%)
Ekspor Sektor Non Minyak	64	1%	34	1%	30	88%
Total Ekspor Barang (goods)	5,099	98%	5,210	99%	(111)	(2%)
Total Ekspor Jasa	89	2%	73	1%	16	22%
Total Ekspor	5,188	100%	5,283	100%	(95)	(2%)
Impor setor Minyak	162	7%	128	6%	34	27%
Impor setor Non-Minyak	640	26%	316	15%	324	103%
Total Impor Barang (goods)	802	33%	444	21%	358	81%
Total impor Jasa	1,598	67%	1,629	79%	(31)	(2%)
Total Impor	2,400	100%	2,073	100%	327	16%
Neraca Perdagangan (Trade)	2,788		3,210		(422)	(13.1%)

Sesuai tabel di atas, ekspor sektor minyak mewakili 99% dari ekspor barang. Struktur Ekspor dan Impor hampir sama antara 2011 dan 2012.

4.1.5. Perpajakan

Rezim pajak minyak bumi tergantung pada wilayah yurisdiksi seperti yang disajikan di bawah ini:



¹ Sumber: Neraca Nasional Timor-Leste 2000-2012, Statistik dan Analisis. Data dalam harga saat ini.

² Sumber: DNPPM.

JPDA - Rezim lama Lampiran F pada 25/10/1999

Berbagai pajak diringkaskan sebagai berikut:

Pajak	Tarif
Pajak penghasilan individu (Karyawan atau subkontraktor)	Tingkat progresif (10%, 15% dan 30%) Pajak tahunan RDTL terutang: 90% Pemotongan pajak bulanan jatuh tempo: (1/12)
Pajak Upah Non Penduduk	20% dari Penghasilan Bruto (Gross Income)
Tarif pajak perusahaan (Corporate)	30%
Pemotongan pajak	Tarif pajak tergantung pada layanan yang disediakan untuk kegiatan perminyakan
Pajak Pertambahan	30% (Applied to the first tier or operator)

JPDA - Rezim baru Bukan Annex F (Kitan & lapangan Lainnya) & TLEA

Tabel di bawah ini merangkum artikel utama yang terkait dengan (Undang-Undang Pajak dan Bea) TDA Bab IX - Ketentuan khusus untuk Perpajakan Minyak dan Gas:

Referensi	Ketentuan Utama/Detail
Bagian III Tidak Langsung Pajak/ Bagian 71 Pajak Tidak Langsung	Tarif pajak layanan atas penyediaan layanan yang ditunjuk kepada Kontraktor sehubungan dengan operasi perminyakan selain dalam JPDA adalah 12%. Tarif pajak penjualan atas impor barang oleh Kontraktor sehubungan dengan operasi perminyakan selain dalam JPDA adalah 6%. Tarif bea masuk atas impor barang oleh Kontraktor sehubungan dengan operasi perminyakan selain dalam JPDA adalah 6%. Tarif pajak perusahaan yang berlaku untuk Kontraktor untuk satu tahun pajak adalah 30%. Tarif pajak penghasilan upah untuk karyawan Kontraktor adalah:
Bagian IV Pajak Penghasilan/ Bagian 72 Tingkat	a) jika karyawan adalah orang perseorangan penduduk dan telah memberikan nomor identifikasi pajak karyawan kepada majikan atau diperlakukan oleh Nomor Identifikasi Pajak Upah kena pajak bulanan hingga USD 550: 10% Upah kena pajak bulanan Di atas USD550: USD55 + 30% dari jumlah upah di atas USD550 b) jika karyawan adalah orang perseorangan non-residen, 20% dari upah kena pajak yang diterima oleh karyawan; c) Dalam kasus lain, 30% dari upah kena pajak yang diterima oleh karyawan.
Bagian 81 Pemotongan Pajak	Kontraktor atau Subkontraktor yang membayar sejumlah pendapatan layanan sumber Timor-Leste kepada seseorang (selain sebagai karyawan) untuk layanan yang diperoleh untuk Operasi Perminyakan harus memotong pajak dari pembayaran dengan tarif 6% dari jumlah kotor yang dibayarkan.
Bagian V Tambahan Pajak Perminyakan / Bagian 83 Pengenaan dari Tambahan Pajak Minyak Bumi (SPT)	Kontraktor yang memiliki jumlah positif dari akumulasi penerimaan bersih untuk Operasi Perminyakan untuk pajak tahun wajib membayar Pajak Tambahan Minyak Bumi (SPT) untuk tahun tersebut. SPT yang harus dibayarkan oleh Kontraktor untuk tahun pajak dihitung berdasarkan rumus berikut: [A x 22,5% / (1-30%)] A adalah akumulasi penerimaan bersih dari Kontraktor untuk Operasi Perminyakan untuk tahun tersebut. SPT yang dikenakan kepada Kontraktor untuk tahun pajak merupakan tambahan dari PPH yang dikenakan kepada kena pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun ini. SPT yang dibayarkan oleh Kontraktor dapat dikurangkan dalam menghitung kena pajak penghasilan Kontraktor pada tahun pajak di mana pajak dibayarkan.

4.1.6. TIMOR GAP, E.P. (Badan Usaha Milik Negara)

TIMOR GAP, E.P., Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) 31/2011, tanggal 27 Juli 2011. Operasinya dimulai pada Januari 2012. Tujuan utamanya adalah untuk bertindak atas nama Negara dalam melakukan bisnis di sektor Minyak dan Gas. Keegiatannya bervariasi dari Onshore ke Offshore dan Nasional ke Internasional. Salah satu portofolio TIMOR GAP, E.P. adalah membantu Pemerintah Timor-Leste dalam mencapai pelaksanaan Proyek Tasi Mane - Suai Supply Base, Betano Refinery, Beaco LNG Plant dan Highway yang menghubungkan ketiga pusat tersebut. TIMOR GAP, E.P. perusahaan didirikan dengan tujuan khusus untuk berpartisipasi dalam operasi perminyakan sebagaimana diatur dalam Petroleum Act 2005.

Selama tahun 2012, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh TIMOR GAP, E.P. dan anak perusahaannya kepada Pemerintah RDTL.

Selama April 2013, dibuat TIMOR GAP PSC 11-106, Unipessoal. Yang terakhir menandatangani Kontrak bagi hasil produksi dengan mitra usaha patungan ENI JPDA 11-106 B.V. (Operator) dan INPEX Offshore Timor-Leste, Ltd¹.

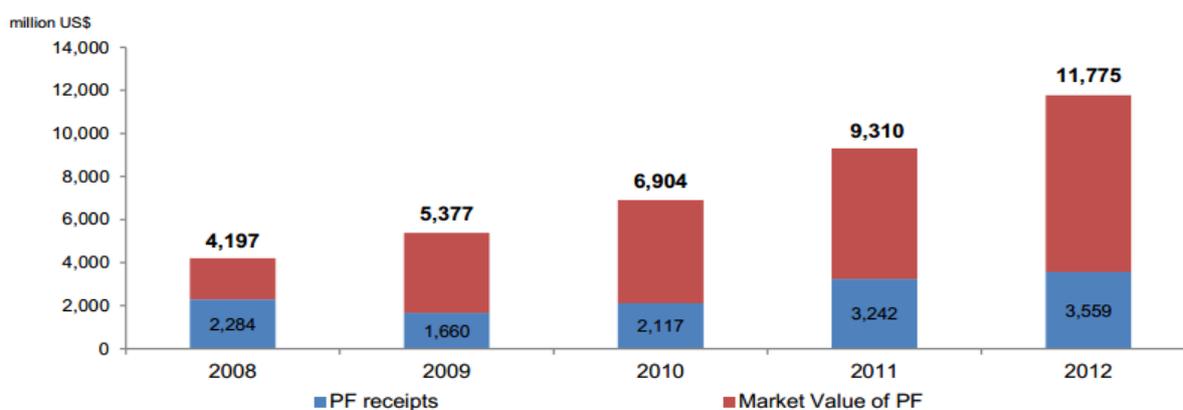
4.1.7. Distribusi Pendapatan dari Industri Ekstraktif

Menurut Undang-Undang Perminyakan, jumlah total yang ditransfer dari DP untuk tahun fiskal tidak boleh melebihi jumlah alokasi yang disetujui oleh Parlemen untuk Tahun Fiskal. Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (ESI) untuk tahun fiskal adalah jumlah maksimum yang dapat diambil dari Dana Perminyakan (DP) pada tahun fiskal tersebut. Selama 2012, USD 1.495 Juta ditransfer ke APBN.

Tabel di bawah ini merangkum evolusi Nilai Pasar Dana Perminyakan selama lima tahun terakhir.

Periode	Jumlah dalam USD				
	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Pasar DP di Awal	2,086	4,197	5,377	6,904	9,310
<i>Total Penerimaan Dana Perminyakan</i>	<i>2,284</i>	<i>1,660</i>	<i>2,117</i>	<i>3,242</i>	<i>3,559</i>
Transfer anggaran	(396)	(512)	(811)	(1,055)	(1,495)
Pengembalian pajak (taxation)	-	-	-	(2)	-
Pengembalian investasi	223	31	221	221	401
Nilai Pasar DP di Akhir	4,197	5,376	6,904	9,310	11,775
<i>Perubahan nilai</i>	<i>2,111</i>	<i>1,180</i>	<i>1,527</i>	<i>2,406</i>	<i>2,465</i>
<i>Perubahan dalam %</i>	<i>101%</i>	<i>28%</i>	<i>28%</i>	<i>35%</i>	<i>26%</i>

Diagram di bawah ini menggambarkan peningkatan nilai pasar DP selama lima tahun terakhir:



4.1.8. Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership)

Sebagian besar Kontraktor di JPDA dan TLEA adalah anak perusahaan dari perusahaan publik yang didirikan di Bursa Efek Australia. Selama tahun buku yang dicakup laporan EITI, tidak ada perubahan beneficial ownership masing-masing perusahaan.

Kontraktor di JPDA dan TLEA	Terdaftar untuk Publik
Woodside Timor Sea Petroleum	Australia Stock Exchange
Eni JPDA 06-105 / Eni JPDA 11-106 / Eni TLEA S06-03, S06-04	Milan Stock Exchange
Oilex 06-103	Australia Stock Exchange

¹ Sumber: TIMOR GAP, E.P's Website.

² Sumber: Laporan Auditor Independen kepada Kementerian Keuangan, sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan Dana Perminyakan untuk tahun 2008-2012

4.2. Sektor Pertambangan

4.2.1. Latar Belakang dan Profil Sektor Pertambangan di RDTL

Rancangan awal Kitab Undang-Undang Hukum Pertambangan dimulai pada April 2011, berlanjut hingga 2012 konsultasi publik di seluruh kabupaten di Wilayah RDTL.

Sektor pertambangan hingga saat ini tidak signifikan dalam RDTL. Selama 2012, sembilan perusahaan pertambangan beroperasi melalui dua belas lisensi, terutama di kerikil dan pasir.

Total penerimaan dari perusahaan pertambangan berjumlah sekitar USD 42.000 seperti yang dijelaskan dalam Lampiran 7 laporan ini. Ini mewakili kurang dari 0,001% dari pendapatan yang dikumpulkan dari perusahaan Minyak dan Gas.

4.2.2. Konteks Hukum

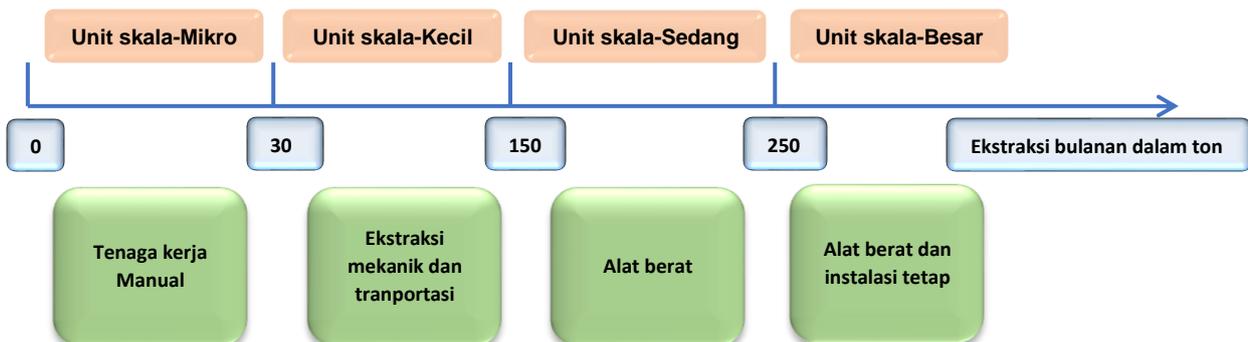
Sektor pertambangan diatur dengan Dekrit Menteri N°1/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang memberikan aturan khusus tentang perizinan kegiatan ekstraktif (pertambangan dan penggalian) massa mineral.

Masa berlaku izin untuk sektor pertambangan adalah satu tahun dan dapat diperpanjang tanpa persyaratan ketat tentang tinjauan teknis dan keuangan pemegang izin. Izin pertambangan yang ada diberikan untuk kegiatan skala menengah, tidak ada putaran penawaran yang dilakukan.

Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai jenis mineral menurut Pasal 4 Dekrit Menteri ini:

Mineral diekstraksi untuk keperluan konstruksi	Batuan
Sand – Grit – Sandstone – Andesine – Basalt – Diorite – Gabbro	Limestone - Marmore

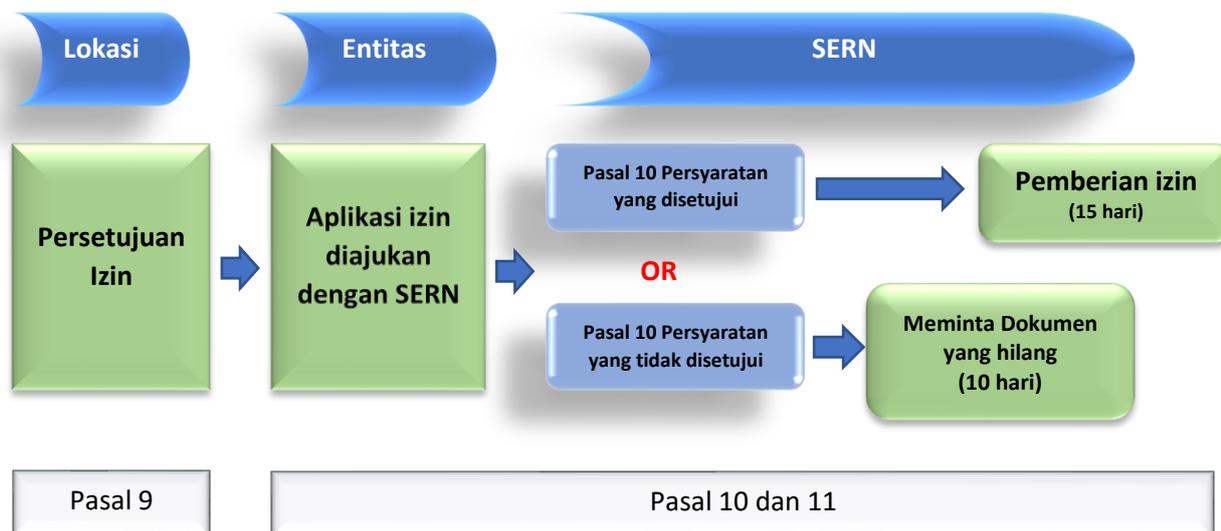
Diagram di bawah menunjukkan 4 (empat) kategori kegiatan pertambangan menurut Pasal 7 dari Dekrit Menteri:



4.2.3. Perizinan

Sektor pertambangan diatur dengan Dekrit Menteri N°1/2008 tanggal 30 Juli 2008, yang mengatur proses perizinan yang berbeda-beda tergantung pada ukuran unit pertambangan.

Skema di bawah ini menjelaskan proses lisensi untuk Unit Skala Menengah:



4.2.4. Perpajakan

Perusahaan pertambangan harus membayar dua biaya seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Referensi	Kuitansi	Satuan Skala Menengah	Unit Berskala Besar
Pasal 8	Pajak setiap Ton dalam USD	Pasir dan Grit : 1.5 Batu Gamping : 2 Marmer: 10	Nilai tetap dihitung dengan ton, berdasarkan produksi/jumlah total yang diekstrak sesuai dengan yang sama nilai-ton.
Pasal 19	Biasa untuk perizinan dalam USD	100	1,000

5. RUANG LINGKUP REKONSILIASI

Pekerjaan kami mencakup analisis awal dari proses pelaporan EITI untuk memastikan bahwa ruang lingkungannya telah terpenuhi telah didefinisikan dengan jelas, termasuk template pelaporan, prosedur pengumpulan data, dan jadwal untuk menerbitkan Laporan EITI. Kami juga berkonsultasi dengan entitas pemerintah untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang ukuran sektor ekstraktif di RDTL dan kontribusinya terhadap ekonomi dan Pendapatan pemerintah.

Kami telah memperhitungkan semua informasi yang tersedia yang disajikan kepada kami selama kerja lapangan kami, termasuk komentar dan informasi selanjutnya diterima dari MSWG dan TL-EITI.

5.1. Pemilihan Ruang Lingkup Rekonsiliasi

Cakupan rekonsiliasi harus untuk dipertimbangkan bagi perusahaan ekstraktif dan entitas pemerintah yang akan dipilih untuk tujuan laporan ini ditentukan oleh MSWG dan TL-EITI. Selain itu Templat pelaporan yang akan digunakan oleh entitas pelapor untuk mengumumkan pembayaran juga telah disiapkan dan disetujui oleh MSWG.

Kami sajikan pada bagian di bawah ruang lingkup rekonsiliasi yang digunakan untuk penyusunan Laporan TL-EITI tahun 2012.

5.2. Perusahaan Ekstraktif yang terlibat dalam Rekonsiliasi EITI

5.2.1. Sektor Minyak & Gas

Perusahaan ekstraktif dan entitas pemerintah yang terlibat dalam rekonsiliasi EITI ditetapkan oleh ToR yang diterbitkan pada bulan Juni 2014 (bagian 5). Dengan demikian, dua puluh (20) perusahaan ekstraktif dan tiga (3) entitas pemerintah dipilih untuk pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2012.

Perusahaan-perusahaan tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

1	AusAid ¹	11	Inpex Sahul Ltd
2	ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	12	Inpex Timor Sea Ltd
3	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	13	Japan Energy Corporation
4	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	14	Minza Oil and Gás Ltd
5	ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd	15	Oilex Ltd
6	ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	16	Petronas ²
7	ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	17	Santos JPDA (91-12) Pty Ltd
8	Eni JPDA 03-13 Ltd	18	Talisman Resources (JPDA 06-105) Pty Ltd
9	Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	19	Tokyo Timor Sea Resources
10	Eni Timor Leste S.p.A.	20	Woodside Petroleum

5.2.2. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan di Timor-Leste hanya mencakup operasi skala menengah yang berspesialisasi dalam pasir dan kerikil. Perusahaan pertambangan membayar royalti dan iuran kepada Direktorat Pertambangan Nasional di awal kontrak. Penerimaan pemerintah dari sektor pertambangan tidak material dibandingkan dengan total penerimaan sektor ekstraktif (0,001%). Akibatnya, perusahaan pertambangan dikecualikan dari kegiatan rekonsiliasi.

¹ AusAid adalah organisasi non pemerintah (NGO) yang setiap tahun membayar pajaksaluran pipa minyak dan gas.

² Untuk Petronas, tidak ada pembayaran yang dilaporkan oleh DNPPM juga ANP, ini diganti dengan Reliance Exploration & Production

5.3. Mencakup Pajak dan Pendapatan

Menurut informasi yang diberikan kepada kami oleh ANP, NDPMR, dan BCTL, semua aliran pembayaran yang berkaitan dengan pajak migas dimasukkan dalam ruang lingkup rekonsiliasi. Dengan demikian, enam belas (16) aliran pembayaran dipilih untuk latihan rekonsiliasi 2012.

Pembayaran ini tercantum dalam tabel di bawah ini:

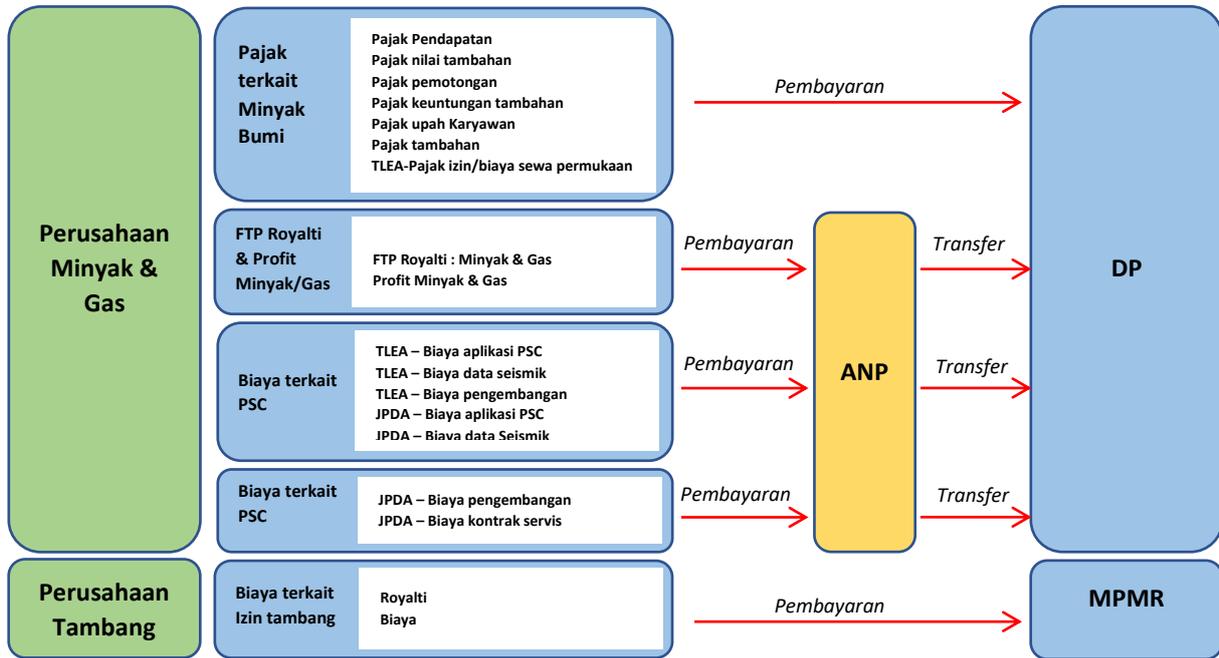
No.	Aliran pendapatan	Keterangan
Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (DNPPM)		
1	Pajak penghasilan	Pajak atas penghasilan kena pajak wajib pajak untuk setiap tahun pajak. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai penghasilan bruto yang dapat dinilai yang diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak dikurangi pemotongan yang diperbolehkan berdasarkan Regulasi ini untuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan kotor.
2	Pajak Keuntungan Tambahan	Pajak penghasilan tambahan terutang oleh Kontraktor yang jumlahnya positif akumulasi penerimaan bersih yang diperoleh dari Proyek Bayu Undan selama satu tahun pajak didefinisikan dalam Perpajakan Undang-Undang Kontraktor Bayu Undan (Timor-Leste 2003).
3	Pajak Keuntungan Cabang	Pajak yang berlaku untuk anak perusahaan asing sebesar 15% setelah pajak penghasilan. Pajak ini secara konseptual mirip dengan pajak dividen
4	VAT	Pajak Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
5	Pemotongan Pajak (WHT)	Ini adalah pajak di mana setiap orang atau perusahaan yang melakukan pembayaran tertentu diharuskan melakukannya memotong dari pembayaran tersebut dan mengirimkannya ke East-Timor Revenue Services (ETRS). Pembayaran yang menarik WHT termasuk biaya manajemen dan konsultasi, komisi, dividen sewa, dan pembayaran kepada kontraktor bukan penduduk.
6	Pajak Upah	Pajak atas gaji karyawan.
7	Pajak tambahan	Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran bagian Royalti dan Keuntungan Negara pada minyak/gas. penilaian pajak
Autoridade Nacional Petroleo (ANP)		
8	FTP - Gas	Suatu pembayaran produksi yang dilakukan menurut PSC antara Pemerintah RDTL dan Perusahaan yang berkaitan dengan penjualan Minyak dan Gas.
9	Untung pembayaran minyak & gas	Suatu pembayaran produksi yang dilakukan menurut PSC antara Pemerintah RDTL dan Perusahaan yang berkaitan dengan laba atas penjualan Minyak dan Gas.
10	JPDA - Biaya Pendaftaran PSC	Biaya yang harus diajukan dengan aplikasi untuk PSC.
11	JPDA - Biaya Data Seismik	Biaya dibayarkan ke ANP saat perusahaan memperoleh data seismik di JPDA.
12	JPDA - Biaya Pengembangan	Berlaku ketika penemuan komersial diumumkan oleh kontraktor. Biaya berdasarkan ukuran penemuan cadangan minyak dan gas.
13	JPDA - Biaya Layanan Kontrak	Biaya permukaan.
14	TLEA - Biaya Aplikasi PSC	Biaya dibayarkan saat perusahaan mengajukan permohonan untuk bersaing dalam putaran lisensi.
15	TLEA - Biaya Data Seismik	Biaya dibayarkan ke ANP saat perusahaan memperoleh data seismik di TLEA
Banco Central Timor-Leste (BCTL)		
16	TLEA - Biaya Lisensi/Biaya Permukaan	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan lisensi. Lisensi adalah pengaturan antara Perusahaan ekstraktif dan Pemerintah mengenai wilayah geografis tertentu atau daerah geologi dan operasi mineral yang berkaitan dengannya. Lisensi juga digunakan untuk menentukan izin, posisi area, area kontrak, sewa atau blok.

5.4. Entitas Pemerintah

Berdasarkan usulan daftar perusahaan ekstraktif dan aliran pembayaran, entitas pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan rekonsiliasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No	Entitas Pusat
1	Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (DNPPM)
2	Autoridade Nacional Petroleo (ANP)
3	Banco Central Timor-Leste (BCTL)

5.5. Diagram Alir Aliran Pembayaran untuk Sektor Ekstraktif



6. HASIL REKONSILIASI

Di bawah ini kami menyajikan hasil rinci dari latihan rekonsiliasi kami, serta perbedaan antara jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan ekstraktif dan jumlah diterima oleh entitas pemerintah. Kami telah menyoroti jumlah yang awalnya dilaporkan dan penyesuaian yang dilakukan setelah pekerjaan rekonsiliasi kami, serta jumlah akhir dan selisih yang tidak direkonsiliasi.

6.1. Rekonsiliasi oleh Perusahaan Ekstraktif

Tabel di bawah merangkum perbedaan antara pembayaran yang dilaporkan oleh perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan pendapatan yang diterima oleh entitas pemerintah.

Jumlah dalam USD

No	Nama Perusahaan	Templat awal diajukan			Penyesuaian			Jumlah akhir		
		Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan	perusahaan	perusahaan	perbedaan
1	Eni Timor Leste S.p.A.	321,129	380,066	(58,937)	-	(57,941)	57,941	321,129	322,125	(996)
2	Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	197,756,396	197,632,739	123,657	15,404	137,941	(122,537)	197,771,800	197,770,680	1,120
3	Eni JPDA 03-13 Ltd	330,295,869	329,712,170	583,699	-	583,649	(583,649)	330,295,869	330,295,819	50
4	Woodside Petroleum	641,060	25,588,342	(24,947,282)	24,947,282	-	24,947,282	25,588,342	25,588,342	-
5	Inpex Sahul Ltd	334,801,648	334,225,955	575,693	-	574,228	(574,228)	334,801,648	334,800,183	1,465
6	Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	329,519,832	329,519,266	566	-	-	-	329,519,832	329,519,266	566
7	Talisman Resources (06-105) Pty Ltd	118,074,098	119,093,364	(1,019,266)	1,019,240	-	1,019,240	119,093,338	119,093,364	(26)
8	Oilex Ltd	120,985	120,985	-	-	-	-	120,985	120,985	-
9	Minza Oil and Gas Ltd	-	176,842	(176,842)	-	-	-	-	176,842	(176,842)
10	Tokyo Timor Sea Resources	278,989,438	278,990,068	(630)	452,384	451,939	445	279,441,822	279,442,007	(185)
11	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	1,091,294,504	1,086,486,707	4,807,797	(3,893,322)	914,550	(4,807,872)	1,087,401,182	1,087,401,257	(75)
12	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	167,085,048	167,085,048	-	-	-	-	167,085,048	167,085,048	-
13	ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	245,689,131	245,689,131	-	-	-	-	245,689,131	245,689,131	-
14	14 ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	29,064,362	29,022,412	41,950	(41,950)	-	(41,950)	29,022,412	29,022,412	-
15	ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	477,202,516	477,202,516	-	-	-	-	477,202,516	477,202,516	-
16	ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd	3,028	3,028	-	-	-	-	3,028	3,028	-
17	Japan Energy Corporation	-	33,865	(33,865)	-	-	-	-	33,865	(33,865)
18	Inpex Timor Sea Ltd	157,315,428	157,315,428	-	-	-	-	157,315,428	157,315,428	-
19	AusAid	8,634,400	8,634,400	-	-	-	-	8,634,400	8,634,400	-
20	Reliance Exploration & Production	-	26,577	(26,577)	-	-	-	-	26,577	(26,577)
Total		3,766,808,872	3,786,938,909	(20,130,037)	22,499,038	2,604,366	19,894,672	3,789,307,910	3,789,543,275	(235,365)

6.2. Rekonsiliasi dengan aliran pendapatan

Tabel di bawah menunjukkan total pembayaran yang dilaporkan oleh perusahaan Migas dan entitas pemerintah:

No Deskripsi pembayaran	Templat awalnya diajukan			Penyesuaian			Jumlah Akhir		
	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan
DNRPM	1,577,938,864	1,600,142,732	(22,203,868)	22,047,099	-	22,047,099	1,599,985,963	1,600,142,732	(156,768)
1. Pajak penghasilan	803,356,868	755,180,065	48,176,803	(21,844,025)	(1,186,772)	(20,657,253)	781,512,843	753,993,293	27,519,550
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17,951,684	17,998,392	(46,708)	-	-	-	17,951,684	17,998,392	(46,708)
3. Pemotongan Pajak	38,121,000	18,379,423	19,741,577	(8,390,045)	-	(8,390,045)	29,730,955	18,379,423	11,351,532
4 Pajak Keuntungan Tambahan (APT)	535,106,585	533,919,453	1,187,132	-	1,186,772	(1,186,772)	535,106,585	535,106,225	360
5. Pajak lainnya (upah karyawan)	13,226,078	8,598,322	4,627,756	(4,650,071)	-	(4,650,071)	8,576,007	8,598,322	(22,315)
6. Pajak Tambahan	170,176,648	266,067,076	(95,890,428)	56,931,240	-	56,931,240	227,107,888	266,067,076	(38,959,188)
ANP	2,180,235,608	2,178,161,777	2,073,830	451,939	2,604,366	(2,152,427)	2,180,687,547	2,180,766,143	(78,597)
7. Royalti FTP : Minyak / Gas & Keuntungan Minyak/Gas	2,174,215,233	2,173,055,952	1,159,280	451,939	1,609,816	(1,157,877)	2,174,667,172	2,174,665,768	1,403
8. JPDA - Biaya Pengembangan	4,897,750	3,983,200	914,550	-	914,550	(914,550)	4,897,750	4,897,750	-
9. JPDA - Biaya Layanan Kontrak	880,000	880,000	-	-	80,000	(80,000)	880,000	960,000	(80,000)
10. TLEA - Biaya Sewa Lisensi / Permukaan	242,625	242,625	-	-	-	-	242,625	242,625	-
BCTL	8,634,400	8,634,400	-	-	-	-	8,634,400	8,634,400	-
11. Biaya saluran pipa (AusAid)	8,634,400	8,634,400	-	-	-	-	8,634,400	8,634,400	-
Total pembayaran Dasar	3,766,808,872	3,786,938,909	(20,130,037)	22,499,038	2,604,366	19,894,672	3,789,307,910	3,789,543,275	(235,365)

Jumlah dalam USD

6.3. Penyesuaian

6.3.1. Penyesuaian Perusahaan Minyak dan Gas

Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan konfirmasi dari perusahaan Migas dan Entitas Pemerintah dan didukung oleh bukti yang memadai jika dianggap perlu. Rincian penyesuaiannya sebagai berikut:

<i>Jumlah dalam USD</i>	
Penyesuaian pembayaran perusahaan Migas	Total
Pajak dibayar tidak dilaporkan (a)	26,418,461
Jumlah pajak yang dilaporkan secara tidak benar (b)	(3,919,423)
Total ditambahkan/dikurangi ke jumlah yang awalnya dilaporkan	22,499,038

Rincian penyesuaian ini oleh perusahaan dirinci dalam tabel di bawah ini:

<i>Jumlah dalam USD</i>			
Perusahaan	Pajak tidak dibayar dilaporkan (a)	Jumlah pajak salah dilaporkan (b)	Total
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	-	15,404	15,404
Woodside Petroleum	24,947,282	-	24,947,282
Talisman Resources (JPDA 06-105) Pty Ltd	1,019,240	-	1,019,240
Tokyo Timor Sea Resources	451,939	445	452,384
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	-	(3,893,322)	(3,893,322)
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	-	(41,950)	(41,950)
Penyesuaian total	26,418,461	(3,919,423)	22,499,038

Rincian penyesuaian ini tercantum dalam tabel di bawah ini:

<i>Jumlah dalam USD</i>				
Aliran pendapatan	Pajak tidak dibayar dilaporkan (a)	Jumlah pajak Salah dilaporkan (b)	Pajak salah diklasifikasikan (c)	Total
DNPPM	25,966,522	(3,919,423)	-	22,047,099
Pendapatan pajak	169,271	-	(22,013,296)	(21,844,025)
Pemotongan Pajak	-	(1,487,583)	(9,877,628)	(8,390,045)
Pajak lainnya (upah karyawan)	-	(4,684,596)	34,525	(4,650,071)
Pajak Tambahan	25,797,251	(722,410)	31,856,399	56,931,240
ANP	451,939	-	-	451,939
Keuntungan Minyak/Gas	451,939	-	-	451,939
Penyesuaian total	26,418,461	(3,919,423)	-	22,499,038

(a) Pajak yang dibayar tidak dilaporkan

Ini adalah aliran pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan Minyak dan Gas tetapi tidak termasuk dalam templat pelaporan mereka. Setelah menerima dan meneliti rincian pembayaran yang dikirim oleh Migas perusahaan kami mencatat bahwa jumlah yang awalnya dicatat dalam templat pelaporan tidak benar. Tabel di bawah merangkum tiga penyesuaian yang dilakukan:

<i>Jumlah dalam USD</i>			
Perusahaan	Aliran pendapatan	Total	Detail
Talisman Resources (06-105) Pty Ltd	Pajak Tambahan	848,969	Pajak tambahan yang dibayarkan tidak dilaporkan.
	Pendapatan pajak	169,271	Pajak Penghasilan yang dibayarkan tidak dilaporkan.
Tokyo Timor Sea Resources	Keuntungan Minyak/Gas	451,939	Keuntungan bunga minyak yang dibayarkan tidak dilaporkan
Woodside Petroleum	Pajak Tambahan	24,947,282	Hutang pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, dibayar pada tanggal 29 Mei 2012 tidak dilaporkan.

Total 26,418,461

(b) Jumlah pajak yang dilaporkan secara tidak benar

Jumlah ini salah dilaporkan dalam templat karena kesalahan atau kesalahan aritmatika antara detail pembayaran dan templat pelaporan.

(c) Pajak salah diklasifikasikan

Jumlah ini salah diklasifikasikan dalam templat. Reklasifikasi terutama dilakukan dari Pajak Penghasilan dan Pemotongan menjadi Pajak Tambahan. Tabel di bawah merangkum penyesuaian yang dilakukan:

Jumlah dalam USD

Perusahaan	Pendapatan pajak	Pemotongan pajak	Pajak lainnya (upah karyawan)	Pajak tambahan	Total
Eni JPDA 03-13 Ltd	(16,584,225)	(7,586,177)	-	24,170,402	-
Oilex Ltd	-	(34,525)	34,525	-	-
Inpex Sahul Ltd	(5,429,071)	(2,256,926)	-	7,685,997	-
Total	2(22,013,296)	(9,877,628)	34,525	31,856,399	-

6.3.2. Penyesuaian Entitas Pemerintah

Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan konfirmasi yang diterima dari perusahaan Migas atau dari entitas pemerintah. Penyesuaian ini dirinci sebagai berikut:

Jumlah dalam USD

Penyesuaian terhadap pendapatan Pemerintah	Total
Pajak yang diterima tidak dilaporkan (a)	2,604,366
Total ditambahkan ke jumlah yang awalnya dilaporkan	2,604,366

Penyesuaian rinci oleh perusahaan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah dalam USD

Perusahaan	Pajak tidak diterima dilaporkan (a)	Pajak salah rahasia	Total
Eni Timor Leste S.p.A.	-	(57,941)	(57,941)
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	80,000	57,941	137,941
Eni JPDA 03-13 Ltd	583,649	-	583,649
Inpex Sahul Ltd	574,228	-	574,228
Tokyo Timor Sea Resources	451,939	-	451,939
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	914,550	-	914,550
Total	2,604,366	-	2,604,366

Rincian penyesuaian berdasarkan pembayaran tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Jumlah dalam USD

Aliran pendapatan	Pajak terimah tidak dilaporkan (a)	Klasifikasi pajak tidak jelas	Total
DNPPM	-	-	-
Pendapatan pajak	-	(1,186,772)	(1,186,772)
Pajak keuntungan tambahan	-	1,186,772	1,186,772
ANP	1,689,817	-	1,689,817
Keuntungan Minyak dan Gas	1,609,816	-	1,609,816
JPDA – Biaya pengembangan	914,550	-	914,550
JPDA – Biaya kontrak servis	80,000	-	80,000
Total	2,604,366	-	2,604,366

(a) Pajak Diterima tidak dilaporkan

Ini adalah aliran pendapatan yang diterima dari perusahaan Minyak dan Gas tetapi tidak termasuk dalam templat pelaporan ANP. Tabel di bawah merangkum penyesuaian yang dilakukan:

Perusahaan	Aliran pendapatan	Jumlah	Jumlah dalam USD
			Detail
Eni JPDA 03-13 Ltd	Keuntungan Minyak/Gas	583,649	Keuntungan bunga minyak
Inpex Sahul Ltd	Keuntungan Minyak/Gas	574,228	Keuntungan bunga minyak
Tokyo Timor Sea Resources	Keuntungan Minyak/Gas	451,939	Keuntungan bunga minyak
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	JPDA – Biasa kontrak servis	80,000	JPDA – biaya kontrak servis
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	JPDA – Biasa pengembangan	914,550	JPDA – biaya pengembangan
Total		2,604,366	

6.4. Perbedaan Yang Tidak Dapat Direkonsiliasi

Setelah penyesuaian kami, total perbedaan sisa pembayaran yang tidak direkonsiliasi berjumlah **USD (235.365)** mewakili **0,006%** dari total pembayaran yang dilaporkan oleh entitas pemerintah.

Ini adalah jumlah selisih positif sebesar **USD 3.201** dan selisih negatif sebesar **USD (238.566)**.

Perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Jumlah dalam USD	
	Total
Templat pelaporan yang tidak diserahkan oleh perusahaan ekstraktif (a)	(237,284)
Bukan selisih materi < USD 10.000	1,919
Total perbedaan	(235,365)

(a) Templat pelaporan yang tidak diserahkan oleh perusahaan ekstraktif

Perbedaan final yang belum direkonsiliasi ini terkait dengan 3 perusahaan yang tidak menyerahkan templat pelaporannya meskipun beberapa kali diingatin. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar sebagai berikut:

Perusahaan	Total Pembayaran	Montante iha USD
Minza Oil and Gás Ltd	176,842	
Japan Energy Corporation	33,865	
Reliance Exploration & Production	26,577	
Total	237,284	

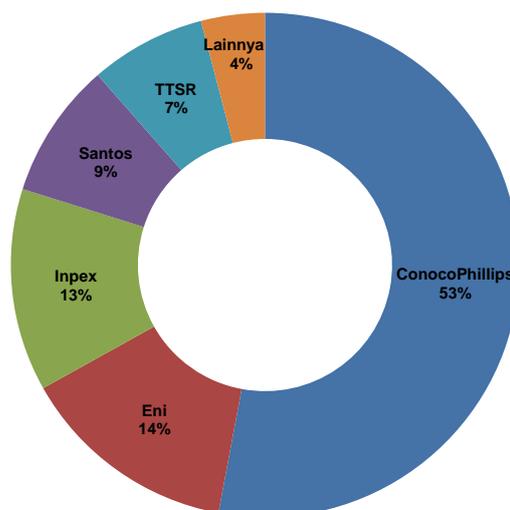
7. DATA YANG DILAPORKAN

7.1. Analisis Pendapatan Pemerintah

7.1.1. Analisis Pembayaran Berdasarkan Kontribusi Perusahaan

Analisis pendapatan Pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan menunjukkan bahwa 5 perusahaan teratas berkontribusi sekitar 96% dari total pendapatan pemerintah selama tahun 2012 dan ConocoPhillips menyumbang hampir 53% dari pendapatan Minyak dan Gas negara untuk periode yang sama. Tabel dan diagram di bawah ini merangkum Pendapatan 2012 dari 5 Perusahaan Teratas):

Perusahaan	Pendapatan Pemerintah	% total pendapatan
ConocoPhillips (entitas 6)	2,006,403,393	53%
ENI (entitas 3)	528,388,624	14%
Inpex (entitas 2)	492,115,611	13%
Santos	329,519,266	9%
Tokyo Timor Sea Resources	279,442,007	7%
Perusahaan yang lain (7 perusahaan)	153,674,374	4%
Total sektor minyak dan Gas	3,789,543,275	100%

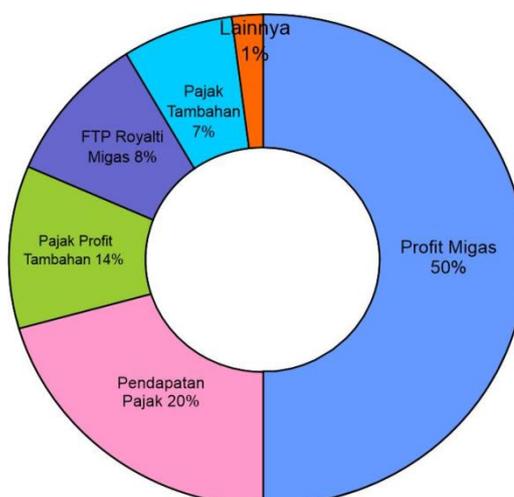


7.1.2. Analisis Pembayaran Menurut Aliran Kontribusi

Analisis pembayaran berdasarkan kontribusi aliran menunjukkan bahwa 5 pajak teratas memberikan kontribusi 99% dari total pendapatan minyak & gas pemerintah. Kami juga mencatat bahwa untung pada akun minyak & gas hampir setengah dari total pendapatan pemerintah.

Tabel dan diagram di bawah merangkum aliran 5 pendapatan teratas selama tahun 2012:

Aliran pendapatan	Pendapatan pemerintah USD	% Total pendapatan
Profit Minyak / Gas	1,884,174,060	50%
Pendapatan Pajak	753,993,293	20%
Pajak Keuntungan Tambahan	535,106,225	14%
FTP Royalti – Minyak dan Gas	290,491,708	8%
Pajak Tambahan	266,067,076	7%
Lain-lain (7 aliran pendapatan)	59,710,912	1%
Total sektor Minyak dan Gas	3,789,543,725	100%



7.2. Analisis Pembayaran berdasarkan Aliran Kontribusi

Analisis kontribusi aliran pembayaran menunjukkan bahwa 5 perusahaan teratas berkontribusi 99% dari total pendapatan minyak dan gas pemerintah. Kami juga mencatat bahwa keuntungan minyak & gas menyumbang hampir setengah dari total pendapatan pemerintah.

Tabel dan diagram di bawah ini meringkas 5 aliran pendapatan teratas selama tahun 2012:

Lokal konten-Pengeluaran yang dapat dipulihkan:

Perusahaan	Jumlah dalam USD
Eni Timor Leste S.p.A.	87,153
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	2,029,878
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	8,212,000
Total	10,329,031

Inisiatif Perusahaan (CSR) - Pengeluaran yang Tidak Dapat Dipulihkan:

Perusahaan	Jumlah dalam USD
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	524,000
Total	524,000

8. REKOMENDASI

Rekomendasi laporan tahunan yang tidak dilaksanakan sebelumnya. Kami menyajikan di bagian bawah ini, langkah-langkah tambahan yang akan diterapkan untuk meningkatkan proses EITI di RDTL. Tindak lanjut laporan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada bagian 8.2 lebih lanjut di bawah ini.

8.1. Pelajaran yang dipetik dari Rekonsiliasi 2012

8.1.1. Kurangnya Hukum EITI

Kami mencatat bahwa meskipun laporan EITI RDTL telah direkonsiliasi selama 4 tahun, kerangka hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam proses EITI belum dibuat).

Kami merekomendasikan pemberlakuan undang-undang EITI sesegera mungkin. Undang-undang ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses EITI oleh semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa proses rekonsiliasi berhasil.

8.1.2. Templat Pembatasan kerangka Laporan

Templat laporan yang digunakan untuk pengumpulan data disiapkan dan disetujui oleh MSWG. Meskipun kerangka referensi kami meramalkan bahwa Administrator Independen harus memberikan saran kepada MSWG pada templat laporan tersebut, kami diberitahu untuk tidak membuat perubahan apa pun pada templat yang ditetapkan. Templat pelaporan memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

- ✦ itu hanya meramalkan deklarasi angka tahunan dari entitas pelapor. Tidak ada jadwal yang disertakan untuk menetapkan jumlah secara rinci: berdasarkan tanggal dan pembayaran, rincian pembayaran adalah dokumen yang diperlukan untuk pekerjaan rekonsiliasi. Ini akan lebih efisien dan akan menghemat banyak waktu jika semua entitas pelapor diminta untuk mengirim rincian pembayaran mereka bersama dengan templat pelaporan mereka;
- ✦ banyak informasi yang diramalkan dalam Standar EITI tidak diminta dalam templat laporan dari perusahaan ekstraktif seperti ekspor, beneficial ownership, audit laporan keuangan dan statistik ketenagakerjaan.

MSWG harus memperbaiki templat laporan di masa depan untuk membuat proses laporan tersebut lebih efisien sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh rekonsiliator Independen. Selain itu templat laporan juga harus lebih komprehensif dan rumit untuk memasukkan semua persyaratan yang diramalkan dalam standar EITI.

8.1.3. Waktu Rekonsiliasi Pekerjaan

Rekonsiliasi pekerjaan dimulai pada akhir September 2014 yang dianggap terlambat, mengingat batas waktu publikasi yang ditetapkan untuk 31 Desember 2014. Jadwal rekonsiliasi kerja sangat ketat dan tidak memberikan waktu yang memadai bagi entitas pelapor untuk menyiapkan data yang diminta. Akibatnya, beberapa perusahaan ekstraktif gagal mengirimkan templat laporan mereka tepat waktu, dan hingga saat ini hanya 17 dari 20 perusahaan yang benar-benar mengirimkan templat.

Kami merekomendasikan agar waktu pelaksanaan rekonsiliasi di masa depan direncanakan dengan lebih baik dan dijadwalkan pada pertengahan tahun. Ini kemungkinan besar akan meningkatkan kerja sama dari entitas pelapor karena mereka akan memiliki cukup waktu untuk mengabdikan diri pada tujuan EITI. Pada saat yang sama juga akan memungkinkan rekonsiliator lebih banyak waktu untuk mengejar perusahaan yang gagal bayar dalam upaya untuk mengurangi jumlah minimal dan perbedaan yang di rekonsiliasikan.

8.1.4. Keterlambatan Penyusunan Laporan EITI karena Rangkaian Kerahasiaan

ToR untuk penyusunan laporan EITI menyatakan bahwa Administrator Independen harus menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan entitas pelapor jika diperlukan oleh entitas pelapor tersebut. Setiap perjanjian kerahasiaan harus sesuai dengan persyaratan dan templat yang ditentukan oleh entitas pelapor tersebut.

Kontrak Administrator Independen kami dengan MPMR untuk rekonsiliasi memperkirakan ketentuan kerahasiaan namun beberapa perusahaan meminta perjanjian tersendiri untuk ditandatangani dengan persyaratan mereka sebagaimana diizinkan dalam ToR. Situasi ini telah menyebabkan penundaan yang cukup besar dalam menerima informasi dari perusahaan yang meminta akta kerahasiaan untuk ditandatangani sebelum mengirimkan templat pelaporan mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini meminta agar draf dan laporan akhir harus disetujui oleh mereka sebelum diserahkan ke MSWG. Hal ini menyebabkan persiapan beberapa versi laporan untuk menghindari pengungkapan informasi antara entitas pelaporan dan akibatnya menyebabkan penundaan tambahan dalam menyerahkan dokumen akhir ke MSWG. Selain itu, kami percaya bahwa perjanjian dan prosedur lebih lanjut ini bertindak sebagai hambatan bagi tujuan transparansi yang ditunjukkan oleh EITI.

Kami merekomendasikan untuk pelaksanaan di masa mendatang bahwa klausul kerahasiaan dalam kontrak antara Administrator Independen dan MPMR ditinjau dengan maksud untuk menetapkan bahwa ini akan menjadi satu-satunya klausul kerahasiaan yang diserahkan kepada dalam Administrator independen. Klausul kerahasiaan harus didiskusikan dengan Administrator Independen selama fase negosiasi kontrak karena adanya persyaratan 5.2 d) dari Standar EITI, mensyaratkan bahwa pengaturan kerahasiaan dibahas dengan Administrator Independen.

8.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan EITI Sebelumnya

No	Masalah (Issue)	Detail Masalah (issue)	Rekomendasi	Status Implementasi Laporan EITI 2012 RDTL (Ya/Belum/ada progres)
1	Basis data RDTL-EITI	Tampaknya sampai saat ini, Sekretariat RDTL-EITI tidak memiliki database yang komprehensif dari semua perusahaan ekstraktif yang beroperasi di sektor minyak. Kami memahami bahwa situasi ini muncul karena tidak ada komunikasi formal antara Sekretariat EITI dan Entitas Pemerintah sehubungan dengan perusahaan minyak yang beroperasi di sektor minyak. Dalam beberapa kasus, melakukan kontak dengan perusahaan ekstraktif bisa jadi sulit karena tidak ada detail kontak yang tersedia.	Kami merekomendasikan bahwa Sekretariat RDTL-EITI harus membuat database dengan perusahaan ekstraktif setelah melaksanakan rekonsiliasi dengan kami. Sekretariat kemudian harus bekerja sama dengan Entitas Pemerintah untuk memastikannya memperoleh informasi yang memadai secara teratur dan memperbarui basis datanya yang sesuai. Untuk tujuan ini, kami percaya bahwa sangat penting untuk setiap pendatang baru di sektor minyak yang terdaftar di Sekretariat RDTL-EITI sebagai bagian dari proses sebelumnya dan pada saat yang sama ketika mereka mendapatkan izin operasi mereka.	Belum
2	Ruang lingkup rekonsiliasi – Studi cakupan	<i>Kami mencatat bahwa dua perusahaan minyak yang beroperasi di RDTL tidak termasuk dalam ruang lingkup rekonsiliasi, yaitu: Japan Energy dan AusAid. Kami mencatat lebih lanjut bahwa ada beberapa biaya yang dibayarkan ke BCTL, seperti biaya pipa tahunan dan biaya eksplorasi yang tidak termasuk dalam templat laporan yang disiapkan dan disetujui oleh MSWG. di sisi lain, ada beberapa aliran pendapatan yang termasuk dalam templat pelaporan yang tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan minyak. Situasi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data dari perusahaan minyak, Entitas Pemerintah dan persiapan laporan.</i>	Kami merekomendasikan untuk tahun-tahun mendatang bahwa studi pemeriksaan awal dilakukan sebelum setiap kegiatan untuk menentukan ruang lingkup rekonsiliasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan yang akan dipertimbangkan (minyak, gas, mineral, dll...); ▪ aliran pendapatan yang akan direkonsiliasi; ▪ perusahaan ekstraktif yang akan melapor; Dan ▪ Entitas pemerintah yang termasuk dalam proses Studi pelingkupan juga akan mengarah pada definisi dan desain templat pelaporan yang akan digunakan untuk deklarasi pembayaran dan penerimaan oleh perusahaan minyak dan Entitas Pemerintah.	Belum




LAMPIRAN

Lampiran 1: Detail dan Pendapatan Perusahaan Besar Minyak dan Gas

Kami sajikan dalam tabel di bawah ini perusahaan minyak dan gas utama di RDTL selama tahun 2012:

No.	Perusahaan	Tahun berdiri (Founding date)	Aktivitas	Nasionalitas
1	ConocoPhillips	1917	Minyak & Gas	USA
2	Eni	1926	Minya & Gas	Italy
3	Santos	1954	Minyak & Gas	Australia
4	Inpex	1986	Minyak & Gas	Australia

Pendapatan yang dibayar kepada RDTL dari perusahaan tahun 2011/2012

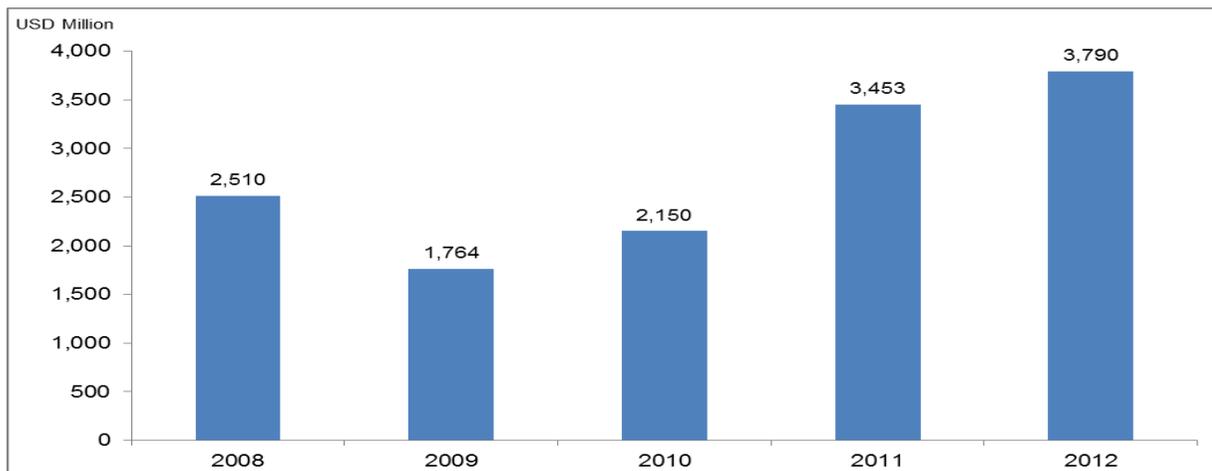
Tabel di bawah ini menunjukkan varians Pendapatan Minyak & Gas antara tahun 2011 & 2012 dibagi berdasarkan perusahaan:

Perusahaan	2012	2011	Bervariasi	
	USD Juta	USD Juta	USD Juta	%
ConocoPhillips (entitas 6)	2,006	1,991	14	1%
Eni (entitas 3)	528	401	127	32%
Inpex (entitas 3)	492	386	106	27%
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	330	365	(36)	-10%
Tokyo Timor Sea Resources	279	290	(11)	-4%
Talisman Resources (JPDA 06-105) Pty Ltd	119	6	113	1755%
Woodside Petroleum	26	1	25	4095%
AusAid	9	8	1	8%
Minza Oil and Gas Ltd	-	-	-	100%
Oilex Ltd	-	-	-	-71%
Japan Energy Corporation	-	-	-	0%
Reliance Exploration & Production	-	4	(4)	-99%

Totál	3,790	3,453	337	10%
--------------	--------------	--------------	------------	------------

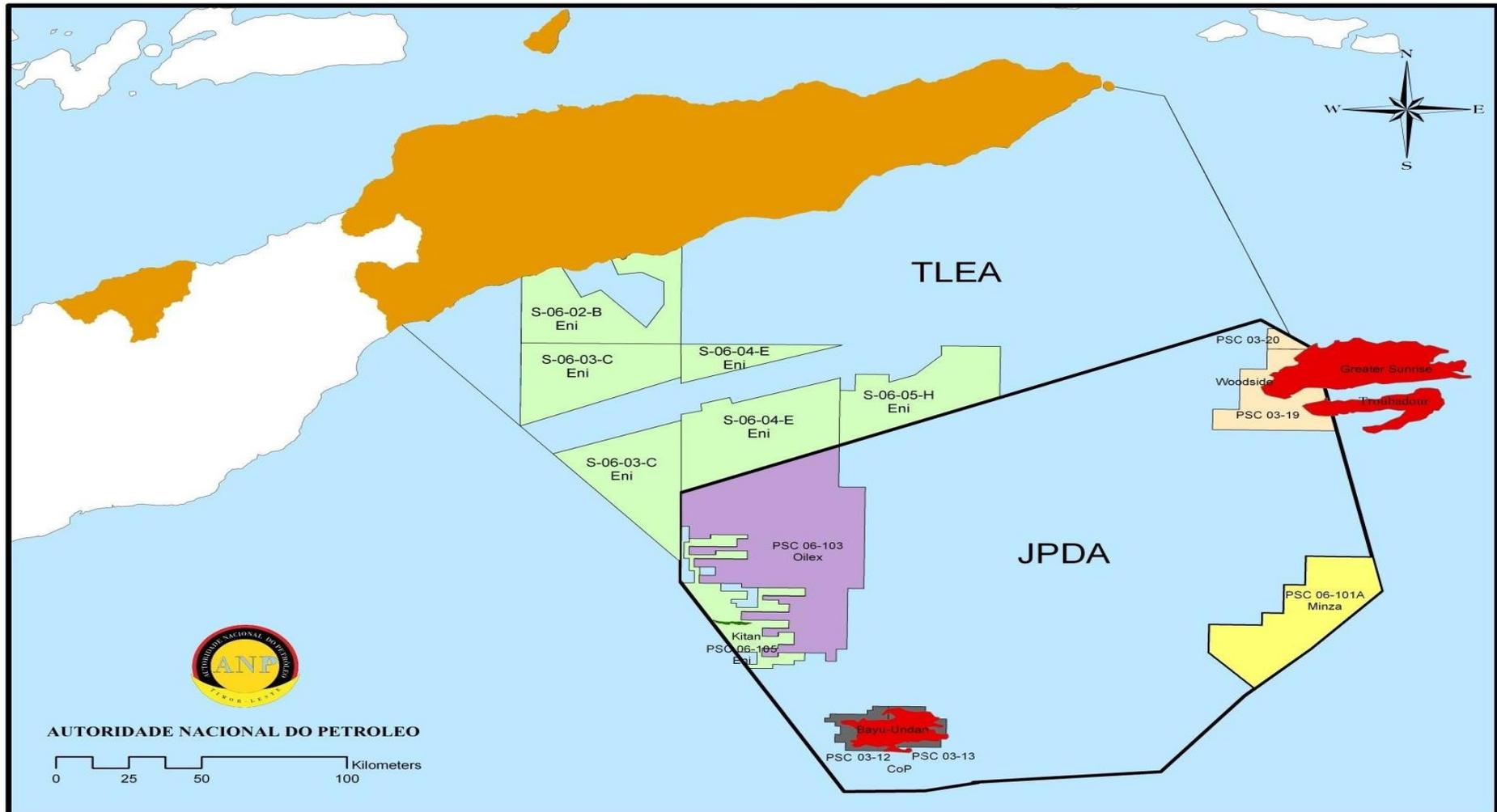
Lampiran 2: Perkembangan Pendapatan Minyak dan Gas antara Tahun 2008 - 2012

Diagram di bawah merangkum evolusi Pendapatan Minyak & Gas antara tahun 2008-2012



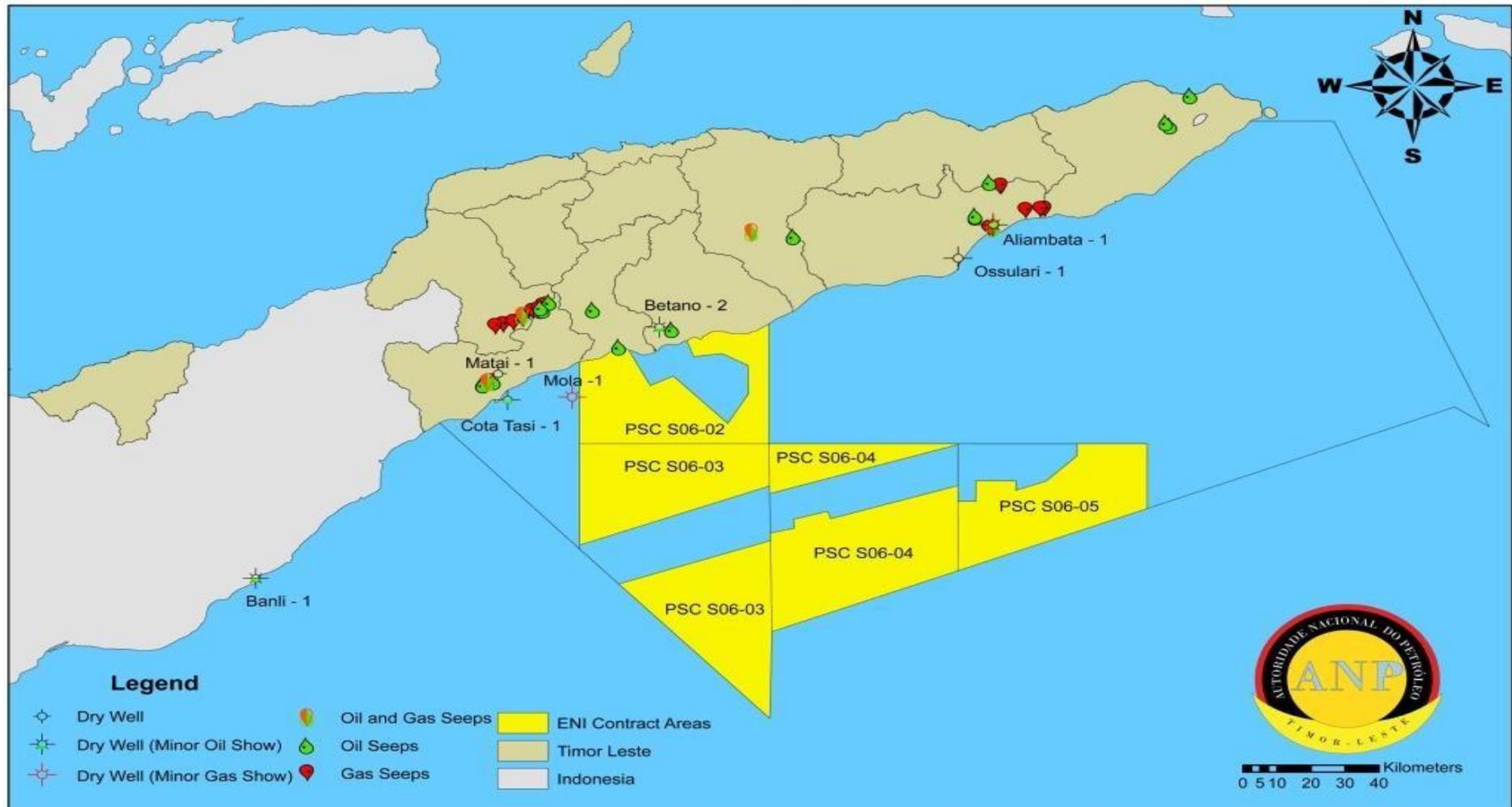


Lampiran 3: Lokasi kontrak di TLEA dan JPDA





Lampiran 4: Rembesan Minyak dan Gas didaratan RDTL



Lampiran 5: Profil Perusahaan Ekstraktif

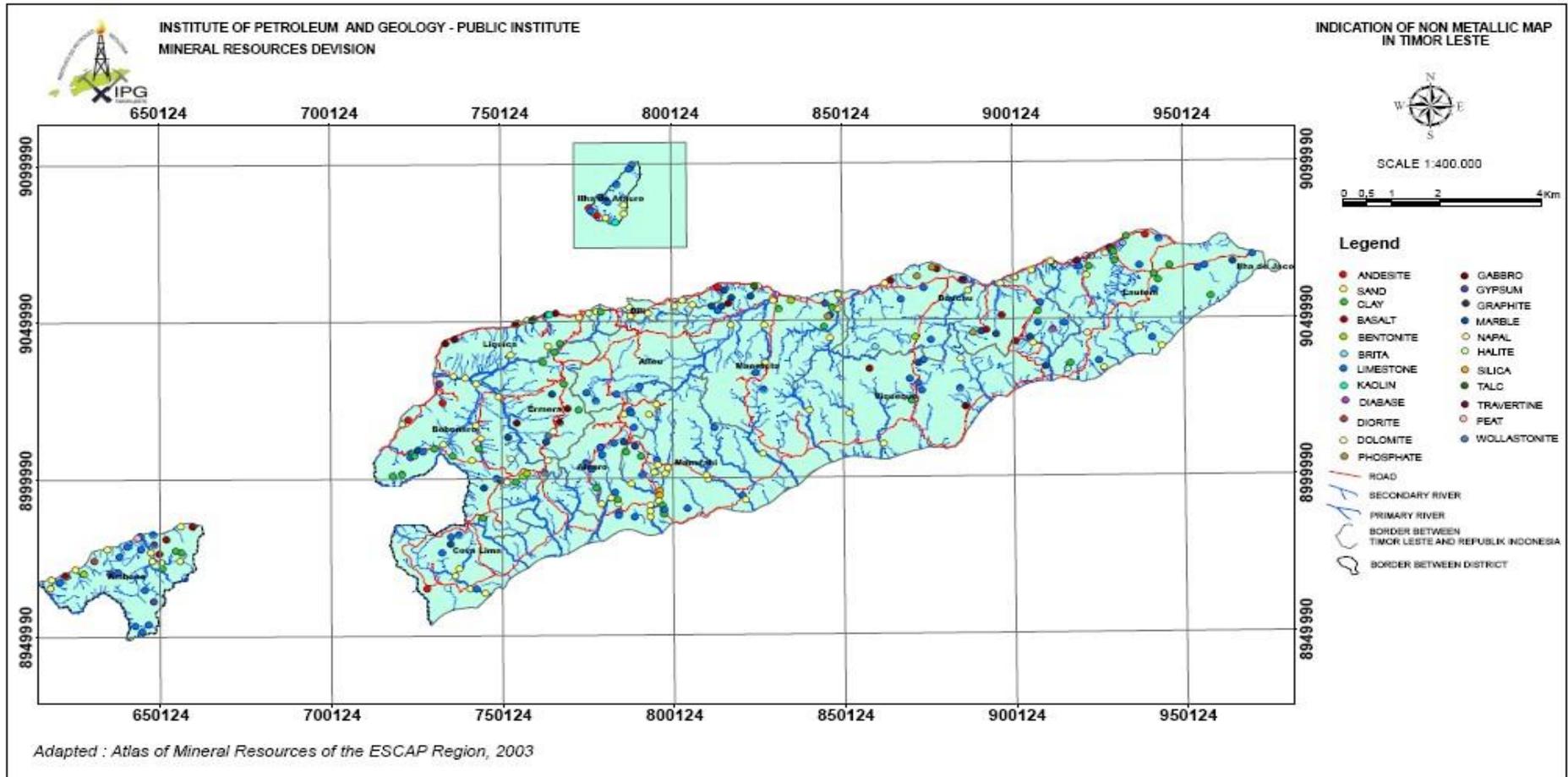
Izin eksploitasi Minyak Aktif sepanjang 2012

No.	Nama Perusahaan	Nama Lokasi Proyek	No. Izin	Tanggal keluar Izin	Tanggal Masa berlaku izin	Tahun Periode	Total Lokasi Permukaan (Surface) km ²	Tipe Mineral yang sudah diekstraksi
1	ENI JPDA 06-105 Pty Ltd (Operator) Inpex Talisman ConocoPhillips (Operator)	JPDA	JPDA 06-105	22/09/2006	Tidak Diindikasikan	-	83	Light Crude Oil
2	Santos Inpex Sahul ConocoPhillips (Operator)	JPDA	JPDA 03-12	02/04/2003	06/02/2022	19	316	Kondensat, LPG, LNG
3	Eni Tokyo Timor Sea Resources Woodside Petroleum (Operator)	JPDA	JPDA 03-13	02/04/2003	16/12/2021	19	330	Kondensat, LPG, LNG
4	Shell Development Osaka Gas Sunrise ConocoPhillips Woodside Petroleum (Operator)	JPDA	JPDA 03-19	02/04/2003	03/10/2026	24	1,092	Gas
5	Shell Development Osaka Gas Sunrise ConocoPhillips	JPDA	JPDA 03-20	02/04/2003	15/11/2026	24	90	Gas

Izin Eksploitasi Minyak aktif selama 2012

No.	Nama Perusahaan	Nama Lokasi Proyek	No Izin	Tanggal dikeluarkan Izin	Tanggal Masa Berlaku Izin	Tahun Periode	Total Área Permukaan (Surface) km ²	Tipe mineral yang sudah diekstraksi
1	Minza Limited	JPDA	JPDA 06-101 A	09/03/2007	09/03/2014	7	1,082	N/A
2	Oilex Ltd (Operator) Japan Energy Corporation Videocon Bharat Petro Resources GSPC Pan Pacific Petroleum	JPDA	JPDA 06-103	15/01/2007	15/01/2014	7	1,971	N/A
3	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Eksplorasi dan Produksi Minyak Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-02 (Blok B)	03/11/2006	03/11/2013	7	1,530	N/A
4	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Eksplorasi dan Produksi Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-03 (Blok C)	03/11/2006	03/11/2013	7	2,841	N/A Minyak
5	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Eksplorasi dan Produksi Perminyakaan Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-04 (Blok E)	03/11/2006	03/11/2013	7	2,314	N/A
6	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Exploracao Produksi Korea Gas Corporasi	TLEA	S-06-05 (Blok H)	03/11/2006	03/11/2013	7	1,422	N/A Petrolifera

Lampiran 6: Kekayaan Mineral di RDTL



Lampiran 7: Pendapatan Sektor Mineral 2012

No	Perusahaan	Tipe Mineral	Tipe Izin	Kuantitas (m ³)	Pendapatan yang telah Dibayar 2012 (USD)	No Izin	Data dikeluarkan	Data masa berlaku selesai	Nama Lokasi Proyek
1	Empat Saudara, Lda	Batu kerikil (Gravel)	Eskala menengah	936	1,872	1	Februari 2012	Februari 2013	Distritu Oe-Cusse
2	RMS Engineering & Construction, Pty Ltd	Pasir(Sands)	Eskala menengah	8,500	12,750	2	Maret 2012	Maret 2013	Comoro, Distritu Dili
3	Ensul, Espehere Engenharia	Pasir (Sands)	Eskala menengah	1,500	2,250	3	Maret 2012	Maret 2013	Comoro, Distritu Dili
4	Timor Block Building Industry	Pasir (Sands)	Eskala menengah	334	501	4	Maret 2012	Maret 2013	Comoro, Distritu Dili
5	Timor Block Building Industry	Pasir (Sands)	Eskala menengah	1,000	1,500	5	Maret 2012	Maret 2013	Comoro, Distritu Dili
6	Jonize Construction, unipessoal, Lda	Batu Kerikil (Gravel)	Eskala menengah	3,300	6,600	6	Juni 2012	Juni 2013	Distritu Liquiça
7	Carya Timor-Leste, Lda	Batu Kerikil (Gravel)	Eskala menengah	3,300	6,600	7	Juni 2012	Juni 2013	Distritu Liquiça
8	Yefa Unipessoal	Pasir (Sands)	Eskala menengah	200	300	8	Mei 2012	Mei 2013	Comoro, Distritu Dili
9	Ensul, Espehere Engenharia	Pasir (Sands)	Eskala menengah	3,000	4,500	9	Juli 2012	Juli 2013	Distritu Manatuto
10	Castelo Fronteira unipessoal	Batu Kerikil (Gravel)	Eskala menengah	750	1,500	10	Juli 2012	Juli 2013	Distritu Covalima
11	Yefa Unipessoal	Pasir (Sands)	Eskala menengah	200	300	11	Agustus 2012	Agustus 2013	
12	Tak-Kong Electronic Unipessoal, Lda	Batu Kerikil (Gravel)	Eskala menengah	2,500	3,750	12	Agustus2012	Agustus 2013	Distritu Manatuto
Total					42,423				

Lampiran 8: Kontak Personal yg terlibat pada rekonsiliasi TL -EITI 2012

Rekonsiliator – Moore Stephens LLP

Tim Woodward	Mitra
Ben Toorabally	Kepala Kantor / Direktur Misi
Radhouane Bouzaiane	Manajer Senior / Ketua Tim
Hedi Zaghouni	Audit Senior
Rita Freitas	Audit Asisten

RDTL Sekretariat EITI

Elda Guterres da Silva	Coordinator Nasional
Trifonio Flor Sarmiento	Staff Outreach
Ana Paula de Araujo	Staff Program
Sonia do Rosario Boavida	Staff Administrasi

Ministériu Petróleu no Rekursu Minerais (MPRM)

Alfredo Pires	Mentri Perminyakan dan Sumber Daya Alam
Elga Anita Torrezao Pereira	Direktur Nasional Mineral

Autoridade Nasional Petroleo (ANP)

Emanuel Angelo Lay	Direktur Pemasaran
Oscar Sanches Faria	Senior Officer – Finance & Fiscal Assurance I
Honesia Araujo	Marketing and Revenue Management Officer
Nuno V. F. Alves	Finance & Fiscal Assurance Officer
Isabel Joanila da Silva	Oil Marketing and Revenue Management Assistant

Direktorat Nasional Pendapatan Perminyakan dan Mineral (DNPPM)

Agustinho Ramos	Staf senior dan Kepala Departemen Kepatuhan
-----------------	---

Kementrian Keuangan

Filipe Nery Bernardo	Analisis dana perminyakan
----------------------	---------------------------

Banco Central de Timor-Leste (BCTL)

Fernando da Silva Carvalho	Kepala akuntan
----------------------------	----------------

Direktorat Jenderal Statistik (DJE)

Paulina Rita Cruz Viegas	Direktur Nasional Statistik Ekonomi dan Sosial
--------------------------	--

Perusahaan Migas	Tanggung Jawab	Fungsi
Woodside Petroleum	Antonio Campos dos Santos	Perwakilan negara dan Penasehat hubungan masyarakat
Woodside Petroleum	Susana Jardim	Manajemen akuntan
Eni	Angelina Baptista Branco	Perwakilan negara
Eni	Mark Sewell	Koordinator akuntansi usaha patungan (Joint Venture)
Eni	Andrew Tay	Akuntan Usaha Patungan (Joint Venture)
Eni	Kelvin Aw-Yang	Auditor keuangan Usaha Patungan (Joint Venture)
Inpex	Kenji Kawano	Manajer Eksekutif & Senior wakil Presiden
Inpex	Yae Miyamoto	Unit koordinasi Perencanaan
Talisman	Read Keith	Direktor
Talisman	Millar Colleen	Senior Accountant Finance and Planning
Minza Oil and Gas Ltd	Dino Gandara	Mantan wakil Presiden
Minza Oil and Gas Ltd	Martin Wollaston	Direktur

Perusahaan Migas	Tanggung Jawab	Fungsi
Timor Gap	Luis Martins	Direktor Bisnis & Pengembangan
Timor Gap	Jacinta Paula Bernardo	Direktor layanan perusahaan
Timor Gap	Francisco Alegria	Penasehat hubungan publik dan Presiden & CEO
Timor Gap	Amandio Ribeiro	Manajer keuangan
Timor Gap	Henrique D.C Monteiro	Manajer – ekonomi proyek dan keuangan
Timor Gap	Francisco da Costa Monteiro	Presiden & CEO
Tokyo Timor Sea Resources	Shinsuke Tsujita	Hubungan publik
Tokyo Timor Sea Resources	Yuhi Harada	Manajer, perencanaan dan pemasaran
Australian Embassy, Dili	Peter M. Macfarlane	Sekretaris pertama
Santos	David Di Blasio	Manajer keuangan
Santos	Joe Ariyaratnam	Manajer – Jelajahi Timor Bonaparte dan Layanan Teknis